

ISBN:
Katalog: 3102033.16

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI SUMATERA SELATAN



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan**

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PROVINSI SUMATERA SELATAN



**Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan**

**INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
PROVINSI SUMATERA SELATAN 2021**

ISBN : 978-602-6925-62-6

Katalog : 3102033.16

Nomor Publikasi : 16000.2133

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : xiv + 87 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dicetak oleh : CV. ItemPuteh Creation

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Ir. Zulkipli, M.Si

Penanggung Jawab :

Tri Ratna Dewi, S.Si, MM

Editor :

Eko Tris Darmanto SST, M.Si

Analisis :

Evi Rosiana SST, M.Si

Septi Elly Mulyana M.App.Ec

Lismiana SE., M.Si

Desi Eryani SST, M.Si

Aditya Gusti Mangestika SST

Kompilasi Data:

Evi Rosiana SST, M.Si

Septi Elly Mulyana M.App.Ec

Lismiana SE., M.Si

Desi Eryani SST, M.Si

Aditya Gusti Mangestika SST

Layout :

Arie Almiyati, SE

KATA PENGANTAR



Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan universal yang telah disepakati dan diimplementasikan dalam empat tahun terakhir oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Data dan informasi tentang capaian implementasi TPB/SDGs dalam pembangunan nasional mutlak diperlukan. Hal ini dalam rangka memonitor capaian dan target serta evaluasi program pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pemerintah penyedia data berkualitas, BPS Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan TPB/SDGs di Sumatera Selatan dalam bentuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan. Publikasi “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2020” ini merupakan bentuk komitmen BPS Sumsel dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Indikator yang disajikan tidak hanya berasal dari BPS saja tetapi juga berasal dari kementerian atau lembaga lain dan Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan salah satu prinsip TPB/SDGs yaitu inklusif, yang diartikan keterlibatan semua *stakeholder*.

Data dan Informasi yang disajikan dalam publikasi ini telah mencakup seluruh tujuan yang ada pada indikator TPB/SDGs. Akan tetapi mengingat keterbatasan ketersediaan data, tidak semua indikator dapat disajikan dalam publikasi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Palembang, November 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan

Zulkipli



KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	1
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	15
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua ..	21
Tujuan 5 Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	35
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	41
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	55
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	61
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	69
Tujuan 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	73
Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	81



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 10.1	Rumah Tangga Sumatera Selatan Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2015-2020	67
Tabel 10.2	Penduduk 5 Tahun ke Atas Sumatera Selatan Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2019-2020	68

<https://sumsel.bps.go.id>



Gambar 1.1	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, 2016-2020	3
Gambar 1.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2020	4
Gambar 1.3	Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020	5
Gambar 1.4	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020	5
Gambar 1.5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020	6
Gambar 1.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020	7
Gambar 1.7	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020	7
Gambar 1.8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020	8
Gambar 1.9	Angka Pratisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020	8
Gambar 1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020	9
Gambar 1.11	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020	9
Gambar 1.12	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik, Baik dari PLN dan Bukan PLN Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020	10



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 KKal/Kapita/Hari (persen), 2016-2020	13
Gambar 2.2	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif, 2016-2020	14
Gambar 3.1	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2020 ...	17
Gambar 3.2	Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020	18
Gambar 3.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan, 2015-2020	19
Gambar 3.4	Unmet Need Pelayanan Kesehatan, 2015-2020	19
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat (persen), 2015-2020	24
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat (persen), 2015-2020	24
Gambar 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat (persen), 2015-2020	25
Gambar 4.4	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun), 2015-2020	25
Gambar 4.5	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota, 2020	26
Gambar 4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (tahun), 2015-2020	27
Gambar 4.7	Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2016-2020	28
Gambar 4.8	Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2016-2020	28



Gambar 4.9	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SD/MI/Sederajat, 2015-2020	29
Gambar 4.10	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMP/MTS/Sederajat, 2015-2020	30
Gambar 4.11	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat, 2015-2020	30
Gambar 4.12	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, 2015-2020	31
Gambar 4.13	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur \geq 15 Tahun (persen), 2015-2020	32
Gambar 4.14	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur \geq 15 Tahun Kabupaten/Kota (persen), 2015-2020	32
Gambar 4.15	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun (persen), 2015-2020	33
Gambar 4.16	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-59 Tahun (persen), 2015-2020	33
Gambar 5.1	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun (persen), 2015-2020	37
Gambar 5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun 2012, 2017 dan 2020	38
Gambar 5.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat (persen), 2015-2020	39
Gambar 5.4	Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam (persen), 2019-2020	40
Gambar 8.1	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), 2016-2020	43
Gambar 8.2	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020	44



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 8.3	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah), 2016-2020	45
Gambar 8.4	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2020	45
Gambar 8.5	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja / Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil per Orang Berkerja per Tahun (persen), 2015-2020	46
Gambar 8.6	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja / Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil per Orang Berkerja per Tahun (persen), 2015-2020	47
Gambar 8.7	Persentase Tenaga Kerja Formal (persen), 2015-2020	48
Gambar 8.8	Upah Rata-Rata per Jam Kerja (ribu rupiah)	48
Gambar 8.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2015-2020	49
Gambar 8.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020	50
Gambar 8.11	Tingkat Setengah Pengangguran (persen), 2016-2020	51
Gambar 8.12	Tingkat Setengah Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020	51
Gambar 8.13	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (persen), 2019-2020	52
Gambar 8.14	Proporsi Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen), 2019-2020	52
Gambar 8.15	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang), 2019-2020	53
Gambar 9.1	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2016-2020	57
Gambar 9.2	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2016-2020	58



Gambar 9.3	Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telpon Genggam (persen), 2016-2020	58
Gambar 9.4	Proporsi Individu yang Menggunakan Internet (persen), 2016-2020	59
Gambar 10.1	Koefisien Gini, 2016-2021	63
Gambar 10.2	Persentase (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang), 2016-2021	64
Gambar 10.3	Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan (persen), 2016-2020	65
Gambar 10.4	Rumah Tangga Sumatera Selatan Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2015-2020	66
Gambar 10.5	Penduduk Sumatera Selatan 5 Tahun ke Atas menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2015-2020	66
Gambar 11.1	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau (persen), 2016-2020	72
Gambar 16.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir, 2016-2020	75
Gambar 16.2	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir, 2016-2020	76
Gambar 16.3	Indeks Kebebasan Sipil, 2016-2020	77
Gambar 16.4	Indeks Hak-Hak Politik, 2016-2020	77
Gambar 16.5	Persentase Anak Berumur 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, 2018-2020	78
Gambar 16.6	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah dan yang Memiliki Akta Kelahiran, 2016-2020	78
Gambar 16.7	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah dan yang Memiliki Akta Kelahiran, 2016-2020	79



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 17.1	Proporsi Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet, 2016-2020	83
Gambar 17.2	Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik, 2017-2020	84
Gambar 17.3	Persentase Konsumen yang Menggunakan Data dan Informasi Statistik BPS sebagai Rujukan, 2017-2020	85
Gambar 17.4	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik, 2017-2020	86
Gambar 17.5	Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional, 2017-2020	87

<https://sumsel.bps.go.id>

**1 TANPA
KEMISKINAN**



<http://sumsel.ms.go.id>

MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN



Kemiskinan sudah menjadi permasalahan dan isu global. Dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun pada tahun 2030. Target-target yang akan dicapai selama 15 tahun ke depan akan diulas lebih lanjut pada penjelasan berikut.

TARGET 1.2 **PADA TAHUN 2030, MENGURANGI SETIDAKNYA SETENGAH PROPORSI LAKI-LAKI, PEREMPUAN, DAN ANAK-ANAK DARI SEMUA USIA YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI**

INDIKATOR 1.2.1 **PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Gambar 1.1
Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan
Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2016-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Hasil Susenas menunjukkan terjadi penurunan angka kemiskinan di Sumatera Selatan secara terus menerus mulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tercatat sebesar 13,54 persen kemudian terus menurun setiap tahunnya hingga menjadi 12,66 persen di tahun 2020. Meskipun angka kemiskinan menurun, upaya pengentasan kemiskinan masih terus dilakukan agar Provinsi Sumatera Selatan terlepas dari masalah kemiskinan. Dalam target RAD (Rencana Aksi Daerah) Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2020 persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ditargetkan berkisar antara 10,00-11,65 persen. Sehingga, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bersinergi untuk menjalankan berbagai program dalam upaya pengentasan kemiskinan agar tercapai target “zero poverty”.



TARGET 1.2 PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN, MEMILIKI HAK YANG SAMA TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, KEPEMILIKAN DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, WARISAN, SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI BARU, DAN JASA KEUANGAN YANG TEPAT, TERMASUK KEUANGAN MIKRO

INDIKATOR 1.2.1 PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.2

Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2017-2020



Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020.

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

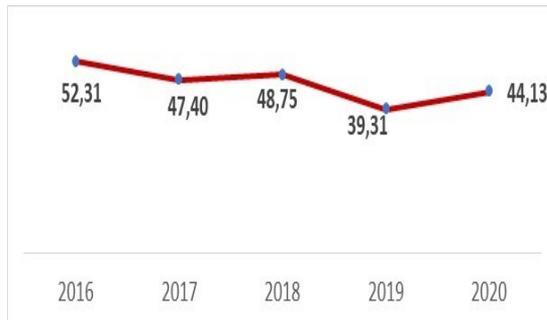
Indikator persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan difokuskan pada penduduk 40% pendapatan terendah (kuintil 1 dan kuintil 2). Pada gambar di atas terlihat bahwa persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebesar 58,48 persen. Persentasenya kemudian terus meningkat hingga mencapai 77,20 persen di tahun 2020. Hal tersebut mengindikasikan ada perubahan ke arah yang lebih baik, sebagai contoh persentase yang lebih tinggi pada tahun 2020 menggambarkan risiko kematian ibu melahirkan yang lebih rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



INDIKATOR 1.4.1.(B) PERSENTASE ANAK UMUR 12-23 BULAN YANG MENERIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.3

Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020



Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap pada tahun 2020 masih di bawah target RAD

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

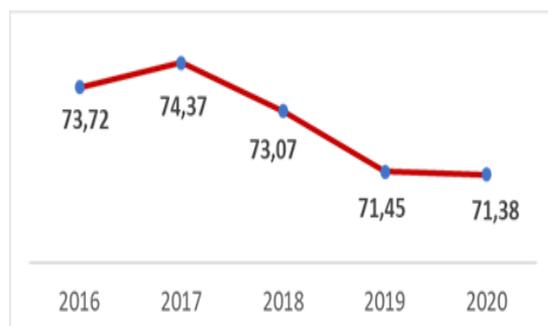
Berdasarkan hasil Susenas, persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap di Sumatera Selatan menurun dari tahun 2016 ke tahun 2017, kemudian sedikit meningkat di tahun 2018, namun turun kembali di tahun 2019 dan akhirnya kembali meningkat di tahun 2020 (44,13 persen). Persentase di tahun 2020 tersebut masih berada di bawah target RAD Provinsi Sumatera Selatan dimana persentase yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah 51,45 persen. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari masyarakat, dan pemerintah agar target RAD tersebut dapat tercapai.

INDIKATOR 1.4.1.(C) PREVALENSI PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI (CPR) SEMUA CARA PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) USIA 15-49 TAHUN YANG BER STATUS KAWIN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.4

Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020

Pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (15-49 tahun) mengalami penurunan



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



Pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (15-49 tahun) mengalami penurunan dari sebesar 71,45 persen di tahun 2019 menjadi 71,38 persen di tahun 2020. Hal ini mengakibatkan target RAD angka pemakaian kontrasepsi pada PUS menurut dokumen RAN yang sebesar 73,66 masih belum bisa tercapai di tahun ini.

INDIKATOR 1.4.1.(D) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN SUMBER AIR MINUM LAYAK DAN BERKELANJUTAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Akses rumah tangga (40 persen pendapatan terendah) terhadap layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan di Sumatera Selatan meningkat pada tahun 2020 (73,85 persen). Jika dibandingkan dengan target RAD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 (ditargetkan sebesar 59,91 persen), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan telah melampaui target.

Gambar 1.5

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020



Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2020 meningkat

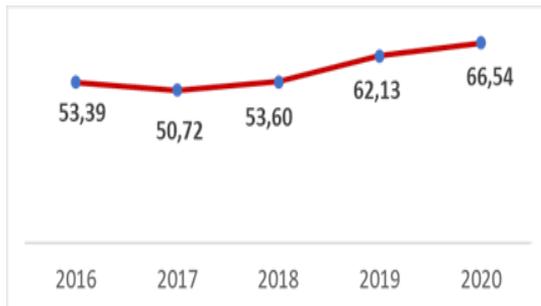
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



INDIKATOR 1.4.1.(E) PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LAYANAN ANITASI LAYAK DAN BERKELANJUTAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.6

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020



Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan mengalami peningkatan

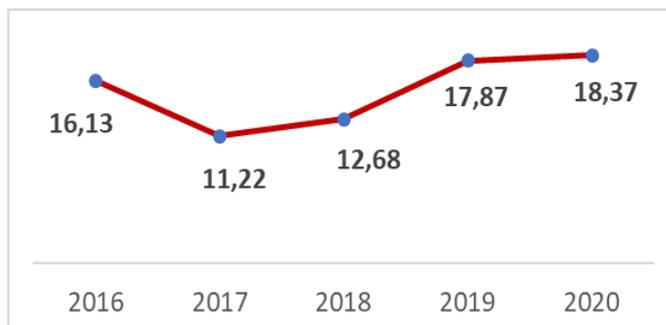
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil Susenas, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Sumatera Selatan di tahun 2016 sebesar 53,39 persen. Kemudian di tahun 2017 persentasenya menurun menjadi 50,72 persen, namun 3 tahun berikutnya terus meningkat hingga mencapai 66,54 persen di tahun 2020. Berdasarkan target RAD, pada tahun 2020 diharapkan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan pada penduduk 40% pendapatan terendah mencapai 59,30 persen. sehingga akses sanitasi layak dan berkelanjutan sudah terpenuhi.

INDIKATOR 1.4.1.(F) PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH PERKOTAAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.7

Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (Penduduk 40% Pendapatan Terendah) (persen), 2016-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



INDIKATOR 1.4.1.(G) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI/SEDERAJAT (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.8

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020

Pada tahun 2020, angka APM SD/MI/Sederajat sudah mencapai 98,63 persen



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jika APM=100, maka dapat dikatakan bahwa seluruh anak sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

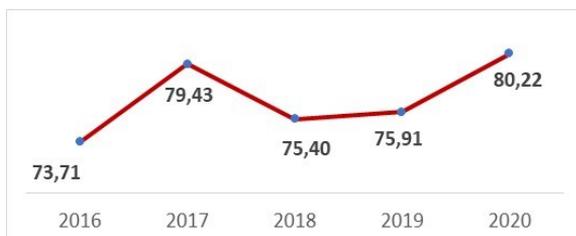
Nilai APM SD/MI/Sederajat di Sumatera Selatan sudah cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 98,63 persen di tahun 2020. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah yang bersekolah di SD/MI/Sederajat dapat bersekolah tepat waktu.

INDIKATOR 1.4.1.(H) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTS/SEDERAJAT (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

APM SMP/MTs/Sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Sumatera Selatan berfluktuasi mulai dari tahun 2016 sebesar 73,71 persen, naik menjadi 79,43 persen di tahun 2017, kemudian turun menjadi 75,40 persen di tahun 2018, kemudian kembali naik di tahun 2019 (75,91 persen) dan tahun 2020 (80,22 persen). Dengan capaian APM SMP/MTs/Sederajat (Penduduk 40% pendapatan terendah) Provinsi Sumatera Selatan tersebut, maka diperlukan usaha yang lebih keras lagi dari segenap stakeholder pendidikan dalam upaya meningkatkan nilai APM SMP/MTs/Sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah).

Gambar 1.9

Angka Pratisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020



APM SMP/MTs/Sederajat penduduk 40% pendapatan terendah) pada tahun 2020, mencapai 80,22 persen

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

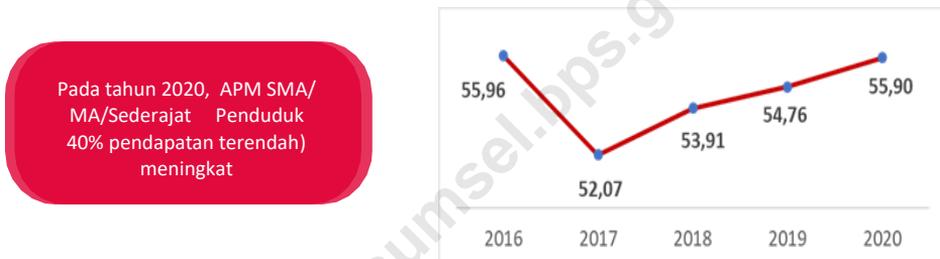


INDIKATOR 1.4.1.(I) ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA/MA/SEDERAJAT

APM SMA/MA/Sederajat (Penduduk 40% pendapatan terendah) pada tahun 2020 di Sumatera Selatan sebesar 54,76. Sebagaimana nilai APM SMP/MTs/Sederajat (Penduduk 40% pendapatan terendah), nilai APM SMA/MA/Sederajat (Penduduk 40% pendapatan terendah) juga lebih rendah dibandingkan dengan APM SMP/MTs/Sederajat (Penduduk 40% pendapatan terendah). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang sekolah, maka semakin kecil anak usia sekolah terkait yang dapat bersekolah tepat waktu.

Gambar 1.10

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR 1.4.1.(J) PERSENTASE PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Gambar 1.11

Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Kepemilikan akta kelahiran akan mempermudah seseorang untuk dapat mengakses berbagai layanan seperti layanan akses kesehatan, akses pendidikan, jaminan sosial dan pelayanan masyarakat lainnya seperti pembuatan SIM, paspor, pengurusan hak waris dan lainnya. Persentase anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran tahun 2020 tercatat 87,98 persen. Jika dibandingkan dengan target RAD pada tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 84,28 persen, ini berarti target tersebut sudah tercapai.



INDIKATOR 1.4.1.(K) PERSENTASE RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN YANG SUMBER PENERANGAN UTAMANYA LISTRIK BAIK DARI PLN DAN BUKAN PLN (PENDUDUK 40% PENDAPATAN TERENDAH)

Kebutuhan akan listrik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Oleh karena itu pemerintah harus dapat menjamin seluruh masyarakat dapat menikmati listrik tidak terkecuali bagi masyarakat miskin dan rentan.

Gambar 1.12
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik, Baik dari PLN dan Bukan PLN (Penduduk 40% Pendapatan Terendah), 2016-2020



Pada tahun 2020, masih ada 1,36 persen rumah tangga belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

2 TANPA KELAPARAN



<https://sumsel.bps.go.id>

MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN



Asupan kalori minimum yang dianjurkan untuk setiap penduduk yaitu 1400 kkal/ kapita/hari yang disesuaikan dengan tingkat usia. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu sejak tahun 2016-2020, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di Sumatera Selatan cenderung berfluktuatif. Persentase tertinggi dicapai pada tahun 2016 (10,62 persen) dan terendah pada tahun 2017 (4,51 persen)

TARGET 1.2

PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN KELAPARAN DAN MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA ORANG, KHUSUSNYA ORANG MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, TERMASUK BAYI, TERHADAP MAKANAN YANG AMAN, BERGIZI DAN CUKUP SEPANJANG TAHUN

INDIKATOR 2.1.2.(A)

PROPORSI PENDUDUK DENGAN ASUPAN KALORI MINIMUM DI BAWAH 1400 KKal / KAPITA/HARI

Gambar 2.1

Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori Minimum di Bawah 1400 KKal/Kapita/Hari (persen), 2016-2020



Proporsi penduduk dengan asupan minimum 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2016-2020 masih di atas target RAD yang

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum pada tahun 2016 cukup tinggi, yaitu 10,62 persen, kemudian turun cukup signifikan di tahun 2017 menjadi 4,51 persen. Selanjutnya naik kembali proporsinya menjadi 6,81 persen untuk kemudian kembali menurun di tahun 2019 (6,97 persen) dan tahun 2020 (6,75 persen). Target RAD 2020 untuk indikator ini yaitu sebesar 4,21 persen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa proporsi penduduk dengan asupan minimum 1400 kkal/kapita/hari pada periode 5 tahun tersebut masih di atas target. Karenanya, masih perlu upaya yang keras untuk meningkatkan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di Sumatera Selatan.



INDIKATOR 2.2.2.(B) PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Sumatera Selatan pada periode waktu tahun 2016 hingga 2020 cukup fluktuatif, mulai dari 46,78 persen di tahun 2016, 58,35 persen di tahun 2017, lalu turun cukup signifikan di tahun 2018 menjadi hanya sebesar 41,56 persen, kemudian naik di tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 64,39 persen dan 68,06 persen. Jika dibandingkan dengan RAN 2020 sebesar 64,00 persen, maka target persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di tahun 2020 telah melampaui target.

Gambar 2.2
Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif, 2016-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan

3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA



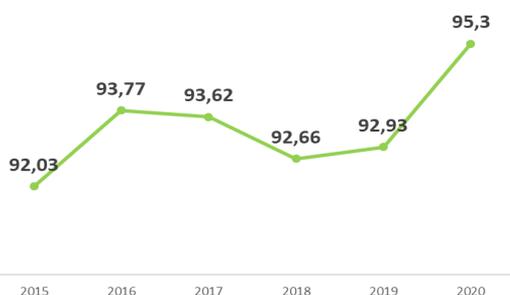
Bonus demografi yang diprediksi akan terjadi di tahun 2020 hingga 2030 mempunyai tantangan yang cukup besar di bidang kesehatan. Kondisi struktur penduduk pada saat itu lebih banyak didominasi oleh penduduk usia produktif. Disamping penambahan penduduk usia produktif, kondisi di masyarakat juga diwarnai dengan penambahan penduduk usia lanjut yang menjadi permasalahan tersendiri. Angka harapan hidup di Sumatera Selatan memang mengalami peningkatan. Tetapi, ancaman penyakit tidak menular yang prevalensinya mengalami peningkatan tidak bisa dianggap remeh.

TARGET 3.1 **PADA TAHUN 2030, MENGURANGI RASIO ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA KURANG DARI 70 PER 100.000 KELAHIRAN**

INDIKATOR 3.1.2* **PROPORSI PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DITOLONG OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH**

Gambar 3.1

Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2020



Persentase kelahiran bayi yang dibantu oleh tenaga kerja terlatih meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Persentase kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih di Sumatera Selatan pada tahun 2020 mencapai persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dengan persentase sebesar 95,3 persen.

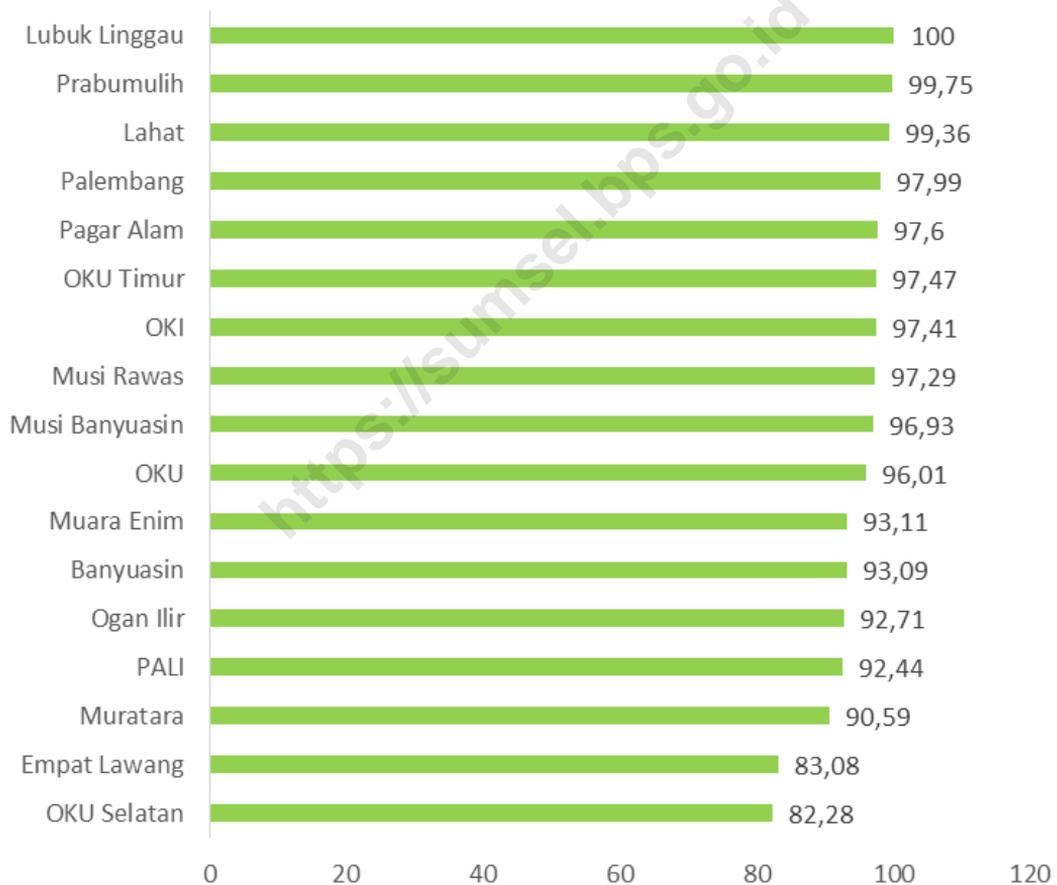
Dalam rentang waktu tahun 2015—2019, proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sudah berada di angka lebih dari 90 persen.



Capaian nilai indikator ini cukup baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai di atas 90 persen, kecuali Empat Lawang dan OKU Selatan yang capaiannya masih di bawah 90 persen. Bahkan di Kota Lubuk Linggau capaian indikator ini di tahun 2020 telah mencapai 100 persen.

Gambar 3.2

Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020

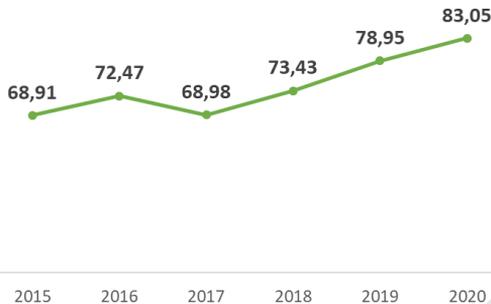


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



INDIKATOR 3.1.2(A)* PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 15-49 TAHUN YANG PROSES MELAHIRKAN TERAKHIRNYA DI FASILITAS KESEHATAN

Gambar 3.3
Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan, 2015-2020



Persentase perempuan yang proses persalinannya di fasilitas kesehatan tahun 2020 mengalami kenaikan

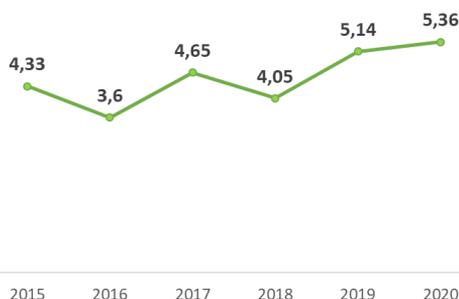
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Rentang waktu antara tahun 2018 sampai 2020, persentase perempuan yang proses persalinannya di fasilitas kesehatan di Sumatera Selatan mengalami kenaikan. Capaiannya pada tahun 2020 telah melebihi 80 persen. Artinya pemenuhan fasilitas kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun begitu prestasi ini masih perlu ditingkatkan di masa mendatang.

TARGET 3.8 **MENCAPAI CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL, TERMA-SUK PERLINDUNGAN RISIKO KEUANGAN, AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BAIK, DAN AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN DAN VAKSIN DASAR YANG AMAN, EFEKTIF, BERKUALITAS, DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA ORANG**

INDIKATOR 3.8.1 (A) UNMET NEED PELAYANAN KESEHATAN

Gambar 3.4
Unmet Need Pelayanan Kesehatan, 2015-2020



Angka unmet need kesehatan tahun 2020 adalah 5,36

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA



Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan adalah pendidikan. Menurut Presiden Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan mengungkapkan pentingnya sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan karakter bagi anak bangsa. SDM dapat memajukan suatu negara asalkan SDM tersebut harus memiliki pengetahuan dan teknologi serta kreativitas dan inovasi. Selain itu, pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai, dan budi pekerti kepada anak-anak bangsa (Kemdikbud, 2018).

TARGET 4.1 **PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA, DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF**

INDIKATOR 4.1.1.(D) **ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/SEDERAJAT**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat di Sumatera Selatan nilainya berada di atas angka 100 persen, Nilai APK SD di Sumatera Selatan yang berada di atas angka 100 persen menunjukkan bahwa populasi murid SD sederajat di Sumatera Selatan mencakup anak di luar batas usia sekolah SD sederajat. Beberapa penyebab yang mungkin terjadi antara lain pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah atau bisa juga disebabkan pengulangan kelas. Selain itu nilai APK SD sederajat yang nilainya di atas 100 persen juga menunjukkan bahwa Sumatera Selatan mampu menampung penduduk usia sekolah SD sederajat lebih dari target yang sesungguhnya.

APK SD sederajat di Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2015 hingga 2020 nilainya selalu di atas 100. Sempat mengalami penurunan nilai dari 114,33 tahun 2016 menjadi 112,14 di tahun 2017, namun APK SD sederajat kembali naik menjadi 114,14 di tahun 2018. Nilai APK SD sederajat di Provinsi Sumatera Selatan kembali turun di tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 nilai APK SD sederajat Sumsel sebesar 111,58 persen



Gambar 4.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat (persen), 2015-2020



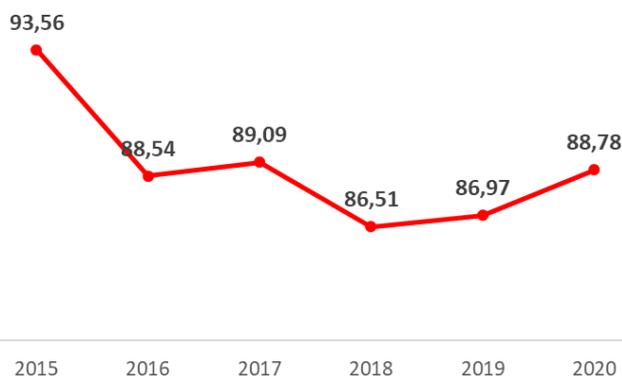
APK SD sederajat berada di atas 100 persen

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR 4.1.1.(E) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/SEDERAJAT

Angka Selama tahun 2015-2020, APK SMP sederajat di Sumatera Selatan lebih rendah dibandingkan APK SD sederajat. Artinya, partisipasi penduduk untuk melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP sederajat lebih rendah dibandingkan pada jenjang pendidikan SD. APK SMP/MTs/sederajat di Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar 88,78 persen lebih tinggi dari tahun 2019 yang nilainya 86,97 persen.

Gambar 4.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat (persen), 2015-2020



Selama tahun 2015-2020, APK SMP sederajat lebih rendah dibandingkan APK SD sederajat

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



INDIKATOR 4.1.1.(F) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT

Gambar 4.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat (persen), 2015-2020



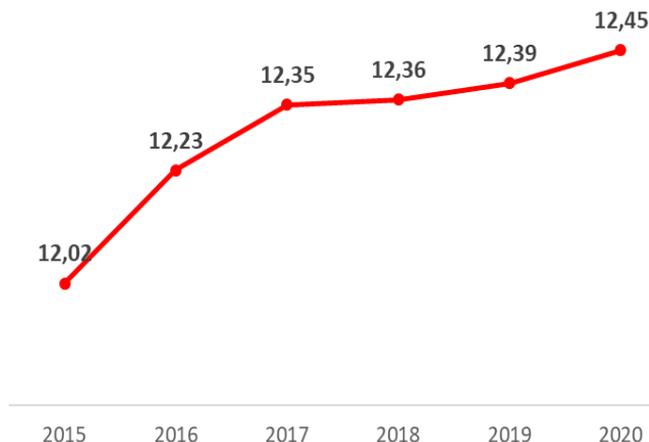
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Nilai APK SMA/SMK/MA/ sederajat di Sumatera Selatan lebih rendah jika dibandingkan nilai APK SMP sederajat dan SD sederajat. Ini bisa berarti semakin tinggi jenjang pendidikan akan semakin berkurang partisipasi masyarakat bersekolah pada jenjang tersebut.

Berbeda dengan APK SD sederajat Sumatera Selatan yang mengalami penurunan di tahun 2020, APK SMA sederajat di tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Peningkatan APK SMA sederajat ini sejalan dengan APK SMP sederajat yang juga mengalami peningkatan di tahun 2020. Sumatera Selatan.

INDIKATOR 4.1.1.(H) ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

Gambar 4.4
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun), 2015-2020



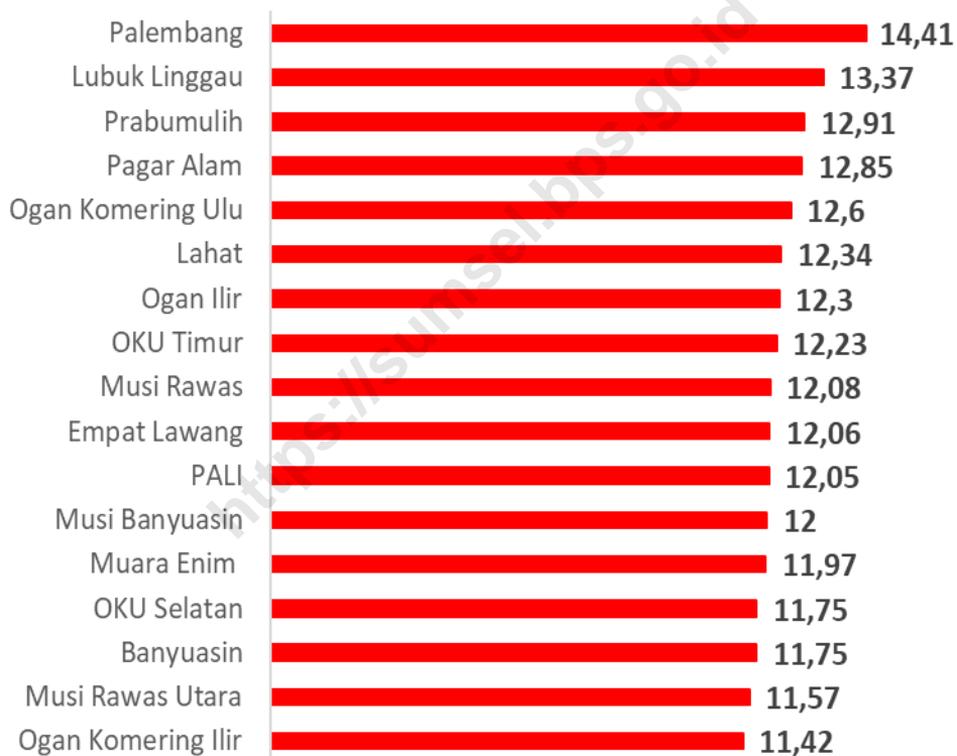
Selama tahun 2015-2020, Angka Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



Angka harapan lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tertinggi adalah di Kota Palembang sebesar 14,41 tahun atau setara DII sedangkan yang terendah di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 11,42 atau setara kelas 2 SLTA. Angka harapan lama sekolah di Sumatera Selatan di wilayah kota lebih tinggi dibanding kabupaten.

Gambar 4.5
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota, 2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Angka harapan lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tertinggi adalah di Kota Palembang sebesar 14,41 tahun atau setara DII sedangkan yang terendah di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 11,42 atau setara kelas 2 SLTA. Angka harapan lama sekolah di Sumatera Selatan di wilayah kota lebih tinggi dibanding kabupaten.



TARGET 4.3 **PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES YANG SAMA BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERHADAP PENDIDIKAN TEKNIK, KEJURUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI, TERMASUK UNIVERSITAS, YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS**

INDIKATOR 4.3.1.(A) **ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK/MA/SEDERAJAT**

Sama dengan indikator 4.1.1(F) sehingga penjelasannya dapat dilihat pada indikator 4.1.1(F).

INDIKATOR 4.3.1.(B) **ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PERGURUAN TINGGI (PT)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada level pendidikan perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan. Capaian nilai APK perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 26,41 persen, masih di bawah nilai APK Nasional yang sebesar 30,85 persen.

Gambar 4.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (tahun), 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



TARGET 4.4

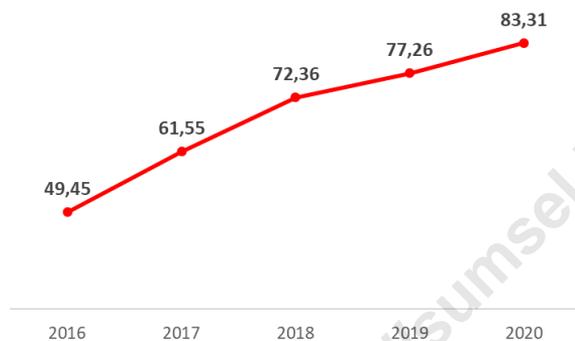
PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN JUMLAH PEMUDA DAN ORANG DEWASA YANG MEMILIKI KETERAMPILAN YANG RELEVAN, TERMASUK KETERAMPILAN TEKNIK DAN KEJURUAN UNTUK PEKERJAAN, PEKERJAAN YANG LAYAK DAN KEWIRAUSAHAAN

INDIKATOR 4.4.1

PROPORSI REMAJA DAN DEWASA DENGAN KETERAMPILAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Gambar 4.7

Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2016-2020



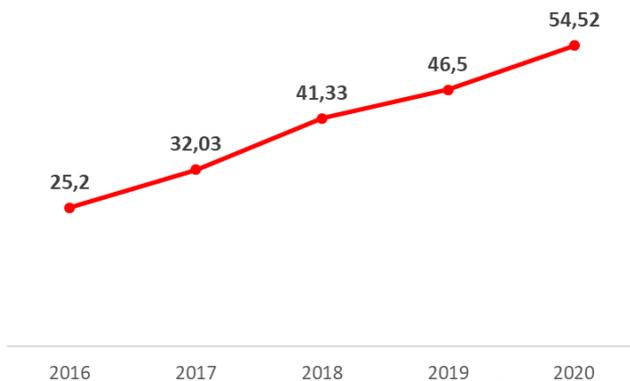
Lebih dari 80 persen penduduk usia 15-24 tahun di Sumatera Selatan terampil dalam penggunaan TIK

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Keterampilan TIK menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi komputer. Kurangnya keterampilan ini bisa menjadi hambatan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kemajuan TIK. Penduduk Provinsi Sumatera Selatan berusia 15-24 tahun sudah banyak yang terampil menggunakan TIK, terlihat dari capaian indikator ini yang naik signifikan. Pada tahun 2016, capainnya baru mencapai 49,45 persen dan naik menjadi 83,31 persen di tahun 2020.

Gambar 4.8

Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 2016-2020





TARGET 4.5

PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN DISPARITAS GENDER DALAM PENDIDIKAN, DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA UNTUK SEMUA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN, BAGI MASYARAKAT RENTAN TERMASUK PENYANDANG CACAT, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, DAN ANAK-ANAK DALAM KONDISI RENTAN

INDIKATOR 4.5.1*

RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI [1] SD/MI/SEDERAJAT; [2] SMP/MTS/SEDERAJAT; 3]SMA/SMK/MA/SEDERAJAT; DAN RASIO ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PEREMPUAN/LAKI-LAKI DI [4] PERGURUAN TINGGI

Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SD/MI/ sederajat di Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar 99,11 persen. Nilai indikator yang berada di bawah 100 persen menunjukkan bahwa penduduk laki-laki umur 7-12 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SD/MI/ sederajat lebih besar dibandingkan penduduk perempuan pada kelompok umur yang sama.

Gambar 4.9

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SD/MI/Sederajat, 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Berbeda dengan level Pendidikan SD, untuk level Pendidikan SMP/MTS/ sederajat nilai APM laki-laki/perempuan tahun 2020 sebesar 101,56 persen yaitu berada di atas 100 persen. Ini berarti penduduk perempuan umur 13-15 tahun yang bersekolah tepat di jenjang SMP/MTS/ sederajat lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki pada kelompok umur yang sama.



Gambar 4.10
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMP/MTS/ Sederajat, 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Rasio APM perempuan/ laki-laki pada jenjang SMA sederajat di Sumatera Selatan bernilai lebih dari 100 yang mencerminkan partisipasi penduduk perempuan umur 16-18 tahun untuk bersekolah tepat pada jenjang SMA sederajat lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2020 rasio APM SMA sederajat perempuan terhadap laki-laki sebesar 102,06 persen, menurun dari tahun 2019 yang sebesar 103,76 persen. Penduduk laki-laki diduga memiliki kecenderungan untuk mencari nafkah atau bekerja sehingga memilih keluar dari sekolah sehingga partisipasi penduduk laki-laki lebih rendah.

Gambar 4.11
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/ Sederajat, 2015-2020



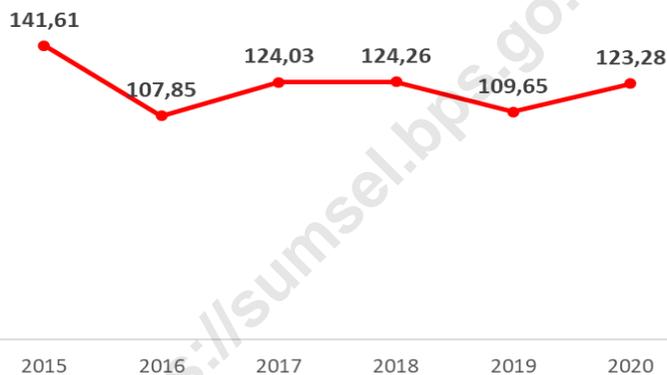
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



Sejalan dengan rasio APM perempuan/ laki-laki pada jenjang SMA sederajat di Sumatera Selatan , pada jenjang perguruan tinggi, rasio APM perempuan/laki-laki juga bernilai lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan penduduk perempuan lebih tinggi partisipasi untuk bersekolah di PT dibandingkan laki-laki. Perempuan dapat mencapai pendidikan yang lebih tinggi, artinya kesetaraan akses pendidikan tinggi bagi perempuan dengan laki-laki sudah terlihat. Dengan pendidikan yang tinggi, perempuan kini akan lebih terbuka untuk menentukan status dan kedudukannya dalam masyarakat.

Gambar 4.12

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

TARGET 4.6

PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA REMAJA DAN PROPORSI KELOMPOK DEWASA TERTENTU, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN, MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI

INDIKATOR 4.6.1(A)

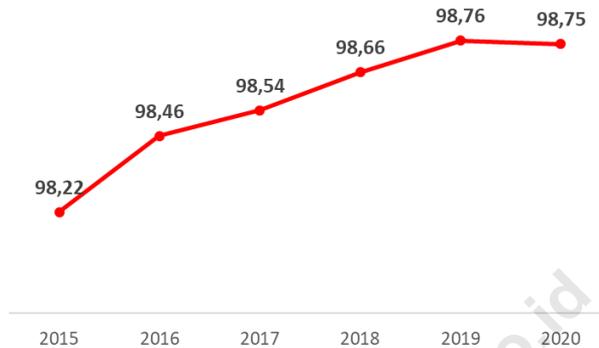
PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR \geq 15 TAHUN

Angka melek aksara penduduk umur \geq 15 tahun di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar 98,75 persen. Ini artinya masih terdapat 1,25 persen penduduk umur \geq 15 tahun di Sumatera Selatan yang masih belum melek aksara. Capaian indikator ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2019 nilai capaian indikator ini sebesar 98,76 persen dan turun menjadi 98,75 persen di tahun 2020.

Penduduk laki-laki umur \geq 15 tahun di Sumatera Selatan tahun 2020 memiliki nilai melek aksara sebesar 99,3 persen, lebih tinggi dari capaian perempuan yang sebesar 98,19 persen. Angka melek aksara umur \geq 15 tahun di Sumatera Selatan juga lebih tinggi untuk kawasan perkotaan dibanding pedesaan, dimana tahun 2020 untuk perkotaan sebesar 99,55 persen sedangkan pedesaan sebesar 98,27 persen.



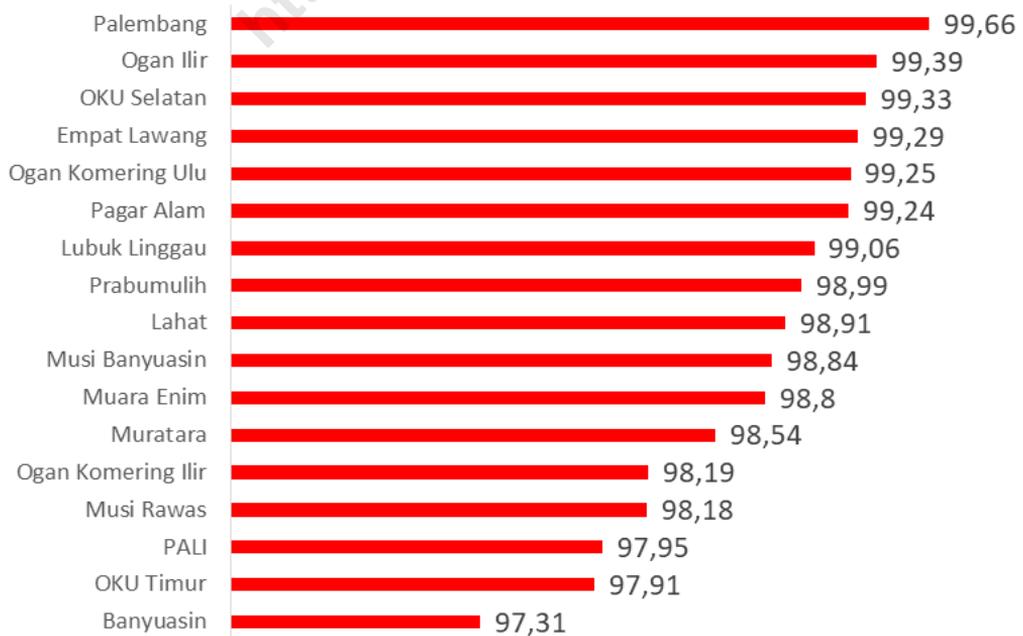
Gambar 4.13
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun (persen), 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Persentase Angka Melek Aksara tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan tertinggi yaitu Kota Palembang sebesar 99,66 persen dan terendah Kabupaten Banyuasin sebesar 97,31 persen. Kabupaten/kota dengan nilai Angka Melek Aksara di bawah nilai Provinsi yaitu Kabupaten Muratara, Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Oku Timur dan Banyuasin.

Gambar 4.14
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Kabupaten/Kota (persen), 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



INDIKATOR 4.6.1.(B) **PERSENTASE ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR 15-24 TAHUN DAN UMUR 15-59 TAHUN**

Gambar 4.15
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun (persen), 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dibandingkan penduduk umur 15 tahun ke atas, pada tahun 2020 persentase Angka Melek Aksara penduduk umur 15-24 tahun di Sumatera Selatan mencatatkan hasil yang lebih baik yaitu sebesar 99,94 persen. Sedangkan untuk penduduk Sumatera Selatan umur 15-59 tahun pada tahun 2020 nilai melek aksara sebesar 99,57 persen.

Gambar 4.16
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-59 Tahun (persen), 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

5 KESETARAAN GENDER



<https://sumsel.bps.go.id>

MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN



Kesetaraan gender yaitu merujuk kepada suatu keadaan yang setara dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penduduk laki-laki dan perempuan (Kementerian PPPA, 2017). Tercapainya kondisi kesetaraan gender dimungkinkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar diantaranya dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat menjalankan roda pembangunan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, mempromosikan kesetaraan gender merupakan bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka pengentasan diri dari jurang kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tidak hanya penting dari sisi moralitas dan keadilan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender juga dianggap sangat penting dan relevan bagi perekonomian sebuah negara (Kementerian Keuangan, 2019).

TARGET 5.3 MENGHAPUSKAN SEMUA PRAKTIK BERBAHAYA, SEPERTI PERKAWINAN USIA ANAK, PERKAWINAN DINI DAN PAKSA, SERTA SUNAT PEREMPUAN

INDIKATOR 5.3.1* PROPORSI PEREMPUAN UMUR 20-24 TAHUN YANG BERSTATUS KAWIN ATAU BERSTATUS HIDUP BERSAMA SEBELUM UMUR 15 TAHUN DAN SEBELUM UMUR 18 TAHUN

Gambar 5.1

Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun (persen), 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera



Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jelas mengatur batasan umur laki-laki dan perempuan untuk kawin/menikah. Pernikahan di usia dini dikhawatirkan akan memberikan risiko kesehatan terhadap perempuan dan memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada tahun 2020, persentase perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup Bersama sebelum umur 15 tahun sebesar 0,71 persen. Persentase ini lebih kecil dibandingkan dengan perkawinan yang dilakukan sebelum umur 18 tahun. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang menurun selama 2015-2018 dan sedikit meningkat di tahun 2019., kemudian menurun kembali di tahun 2020. Tahun 2020, sekitar 13,44 persen perempuan umur 20-24 tahun sudah kawin/ menikah atau hidup bersama sebelum berumur 18 tahun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 12,53 persen. Masih terdapat perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun perlu terus diperhatikan mengingat pemerintah telah merevisi batasan umur seseorang bisa melangsungkan perkawinan minimal berumur 19 tahun.

INDIKATOR 5.3.1 (A) MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN PERNAH KAWIN UMUR 25-49 TAHUN

Gambar 5.2

Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun 2012, 2017 dan 2020



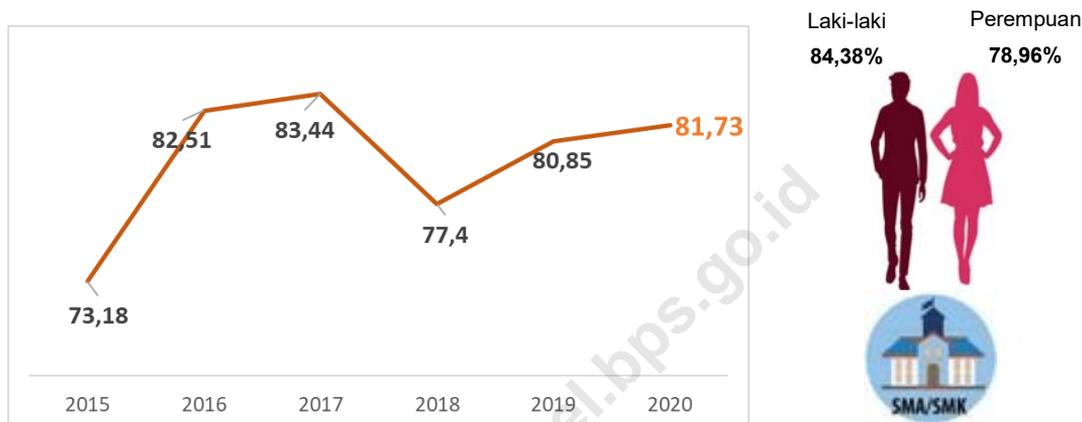
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera

Median umur kawin pada tahun 2020 sebesar 20 menurun dari tahun 2017 yang sebesar 21,3. Namun demikian, median umur kawin sudah selaras dengan batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 19 tahun.



INDIKATOR 5.3.1 (C) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK MA/ SEDERAJAT

Gambar 5.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat (persen), 2015-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera

Pendidikan yang berkualitas dan dapat dinikmati semua, baik laki-laki maupun perempuan merupakan langkah penting mencapai tujuan pembangunan dan untuk mengurangi ketimpangan gender. Tren APK SMA/SMK/MA/ sederajat tahun 2015- 2017 di Sumatera Selatan cenderung mengalami peningkatan. Selanjutnya menurun ditahun 2018, namun kemudian meningkat kembali di tahun 2019 dan 2020. Partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat tahun 2020 tercatat sebesar 81,73 persen.

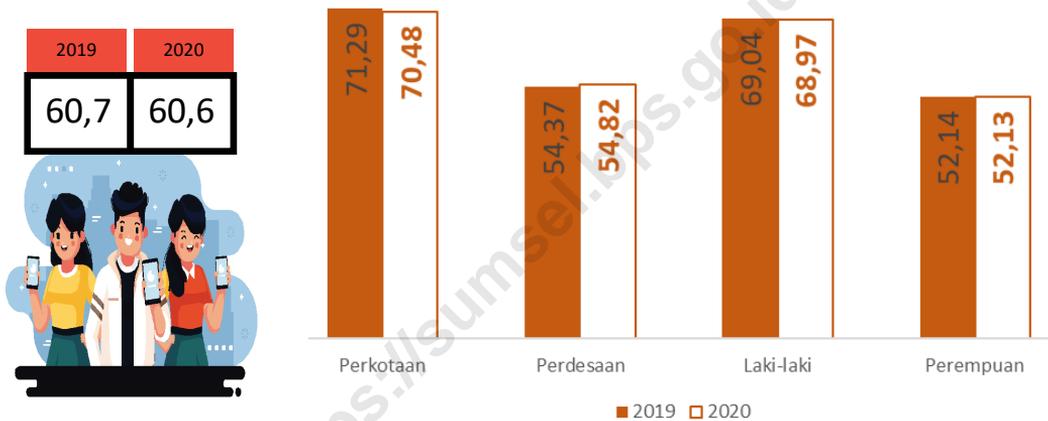
Berdasarkan jenis kelamin, APK SMA/SMK/MA/ sederajat laki-laki sebesar 84,38 persen, lebih besar dari APK perempuan yang sebesar 78,96 persen. APK yang bernilai di bawah 100 persen mencerminkan bahwa daya serap penduduk pada jenjang SMA sederajat belum optimal. Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, hanya 1 (satu) kota yang APSnya diatas 100 yaitu Kota Palembang. Dan terendah di kabupaten Musi Rawas sebesar 62,47. Seiring perkembangan era industri 4.0 yang berjalan saat ini, kita dihadapkan pada kondisi dimana kompetensi dan daya saing menjadi kunci untuk memasuki pasar kerja. Partisipasi pendidikan yang semakin tinggi diharapkan mampu menjembatani tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, partisipasi sekolah pada jenjang SMA sederajat harus terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



TARGET 5.B MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

INDIKATOR 5.B.1* PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGAM

Gambar 5.4
Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam (persen), 2019-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera

Zaman yang disebut sebagai era digital sekarang ini, penggunaan alat komunikasi menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Salah satu alat komunikasi yang kerap ditemui dan dimiliki oleh masyarakat yaitu telepon genggam. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam tahun 2020 mencapai 60,68 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 60,70 persen. Penurunan ini terjadi di daerah perkotaan. Sebaliknya di daerah perdesaan meningkat. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2020, proporsi penduduk laki-laki lebih banyak yang menguasai telepon genggam dibandingkan dengan perempuan yaitu 68,97 persen berbanding dengan 52,13 persen.

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA



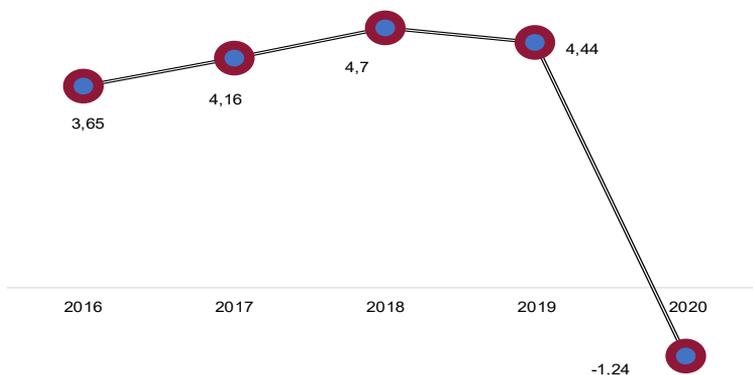
PDRB per kapita tahun 2016-2019 di Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sejalan dengan laju pertumbuhannya yang terus meningkat. Namun di tahun 2020, PDRB per kapita mengalami kontraksi. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum di Sumatera Selatan di tahun 2016-2020 memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan kategori ini mengalami kontraksi hingga 7,21 persen. Untuk itu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

TARGET 8.1 MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER KAPITA SESUAI DENGAN KONDISI NASIONAL DAN KHUSUSNYA SETIDAKNYA 7 PERSEN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO PER TAHUN DI NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 8.1.1 LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA

Gambar 8.1

Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), 2016-2020

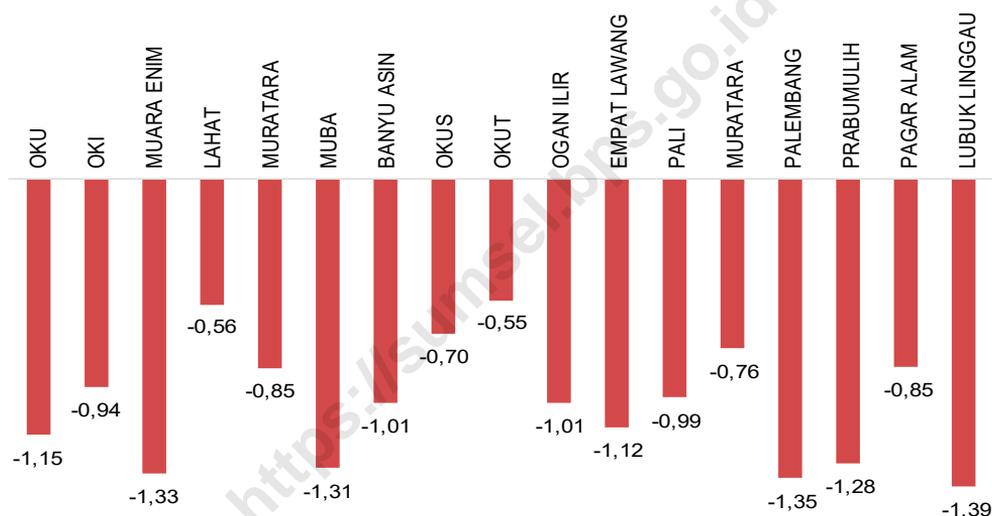


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (Susenas KOR), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



Selama periode 2016-2020 rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,49 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 4,70 persen. Sementara, nilai PDRB per Kapita Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,24. Kontraksi ini turut dipengaruhi oleh penurunan perekonomian global saat pandemi Covid-19 terjadi.

Gambar 8.2
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Bila diamati menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan, laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan di seluruh kabupaten/kota mengalami kontraksi. Kontraksi tertinggi di tempati oleh Kota Lubuk Linggau (-1,39 persen), Kota Palembang (-1,35 persen), dan Kabupaten Muara Enim (-1,33 persen). Sementara itu, kontraksi paling kecil di tempati oleh Kabupaten OKU Timur (-0,55 persen), Lahat (-0,56 persen) dan Kabupaten Muratara (-0,76 persen).

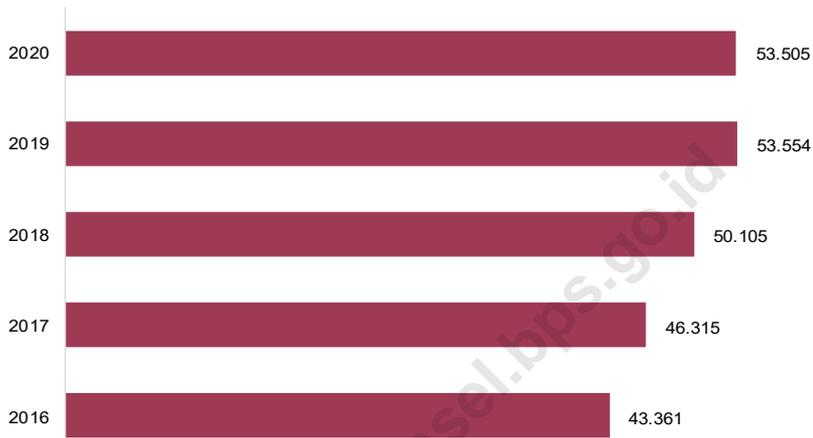
INDIKATOR 5.3.1 (C) ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/SMK MA/ SEDERAJAT

Pendapatan per kapita yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. PDRB per kapita Sumatera Selatan menunjukkan kenaikan dalam kurun waktu 2016-2019. Namun, PDRB per kapita



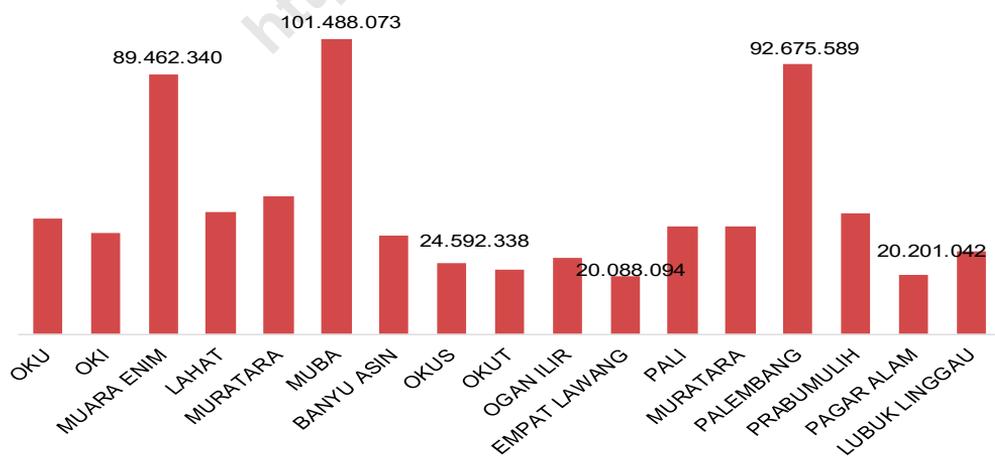
masyarakat Sumatera Selatan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 53,5 juta. Pandemi Covid-19 yang terjadi juga turut berdampak kepada penurunan pendapatan per kapita di Sumatera Selatan.

Gambar 8.3
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah), 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 8.4
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (ribu rupiah), 2020



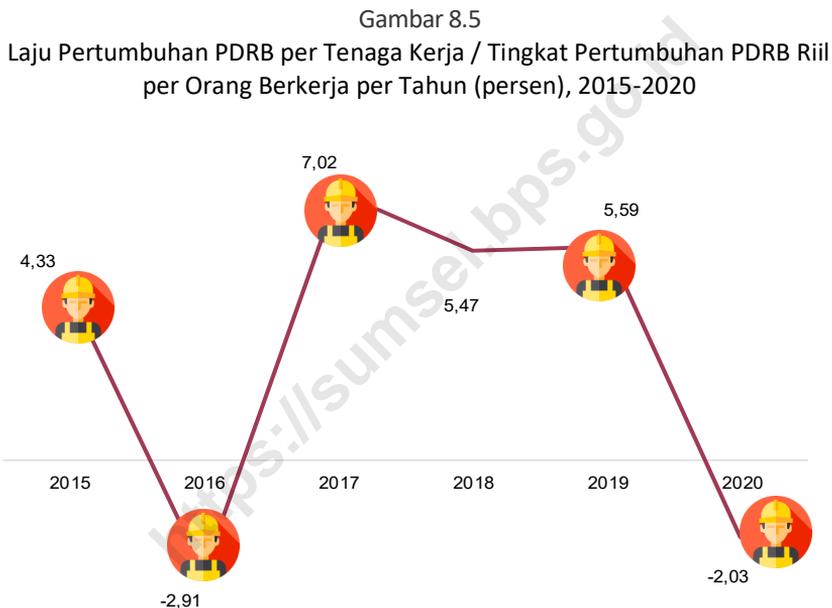
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi tahun 2020 di tempati oleh Kabupaten Muba, Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terkecil tahun 2020 di tempati oleh Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam dan Kabupaten OKU selatan.



TARGET 8.2 **MENCAPAI TINGKAT PRODUKTIVITAS EKONOMI YANG LEBIH TINGGI, MELALUI DIVERSIFIKASI, PENINGKATAN DAN INOVASI TEKNOLOGI, TERMASUK MELALUI FOKUS PADA SEKTOR YANG MEMBERI NILAI TAMBAH TINGGI DAN PADAT KARYA**

INDIKATOR 8.2.1 **LAJU PERTUMBUHAN PDRB PER TENAGA KERJA/TINGKAT PERTUMBUHAN PDRB RIIL PER ORANG BEKERJA PER TAHUN**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

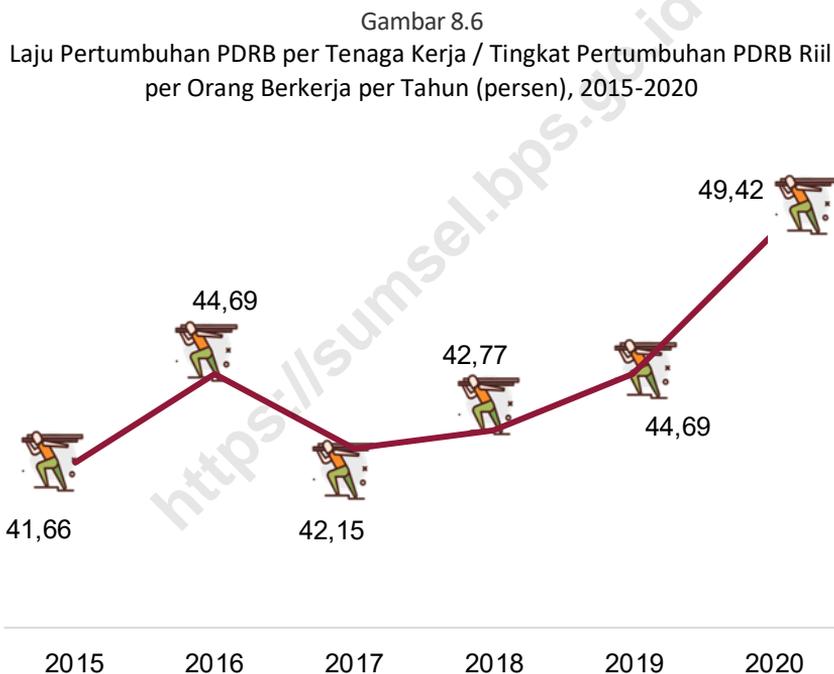
Indikator ini digunakan untuk melihat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selama tahun 2015-2020 produktivitas tenaga kerja di Sumatera Selatan menunjukkan adanya fluktuatif. Kecenderungan terkontraksi dalam di tahun 2016 tidak terlepas karena efek kris global sehingga pertumbuhan produktivitas menurun hingga minus 2,91 persen.

Pada tahun 2019 tercatat laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja sebesar 5,59 persen. Kemudian, di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,03 persen disebabkan oleh pandemi Covid -19 yang mengakibatkan kontraksinya laju pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja/tingkat pertumbuhan PDRB ril per orang bekerja pertahun.



TARGET 8.3 MENGGALAKKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRODUKTIF, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA YANG LAYAK, KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI, DAN MENDORONG FORMALISASI DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TERMASUK MELALUI AKSES TERHADAP JASA KEUANGAN

INDIKATOR 8.3.1 PROPORSI LAPANGAN KERJA INFORMAL SEKTOR NON-PERTANIAN, BERDASARKAN JENIS KELAMIN



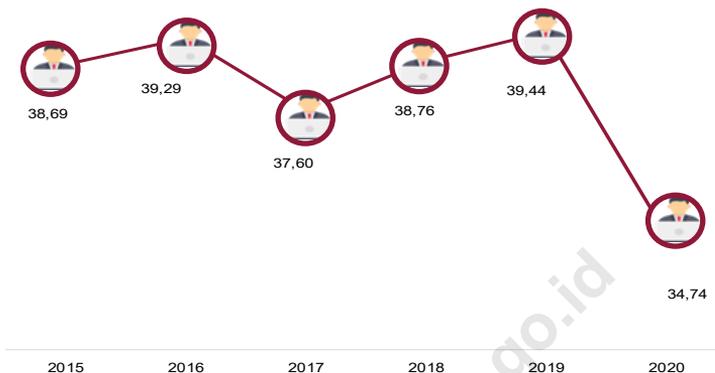
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM. Selama empat tahun terakhir, terlihat proporsi lapangan kerja informal meningkat pada tahun 2017-2020 berturut-turut 42,15; 42,77; 44,69 persen; serta 49,72.



INDIKATOR 8.3.1.(A) PERSENTASE TENAGA KERJA FORMAL

Gambar 8.7
Persentase Tenaga Kerja Formal (persen), 2015-2020



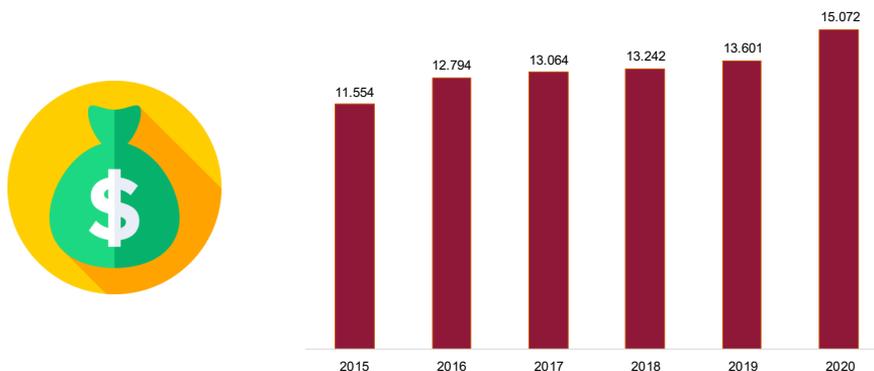
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Persentase tenaga kerja formal di Sumatera Selatan senantiasa meningkat pada periode tahun 2018-2019. Namun di tahun 2020, terjadi penurunan persentase tenaga kerja formal secara signifikan hingga menjadi 34,74 persen. Seperti pola yang terjadi secara nasional, di Sumatera Selatan angkatan kerja yang bekerja di sektor formal jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan yang bekerja di sektor informal.

TARGET 8.5 PADA TAHUN 2030, MENCAPAI PEKERJAAN TETAP DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERMASUK BAGI PEMUDA DAN PENYANDANG DIFABILITAS, DAN UPAH YANG SAMA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA

INDIKATOR 8.5.1 UPAH RATA-RATA PER JAM KERJA

Gambar 8.8
Upah Rata-Rata per Jam Kerja (ribu rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

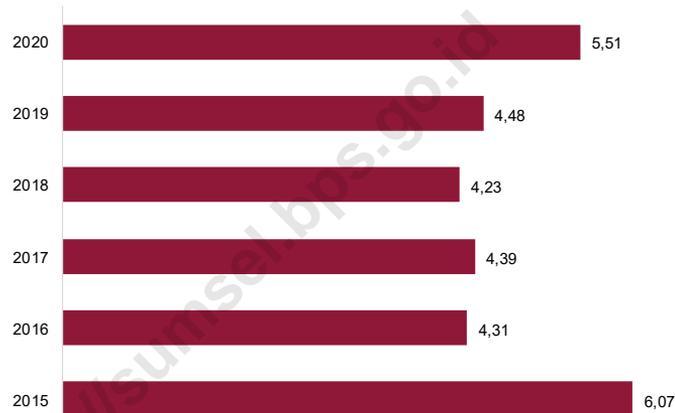


Upah rata-rata per jam kerja di Sumatera Selatan dalam enam tahun terakhir mengalami peningkatan. Upah rata-rata per jam kerja tahun 2020 meningkat 10,81 persen dari tahun sebelumnya.

INDIKATOR 8.5.2*

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Gambar 8.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Selama periode 2016-2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Selatan mengalami penurunan seperti skala nasional. Namun, pada tahun 2020, TPT di Sumatera Selatan Kembali meningkat menjadi 5,51 persen. Angka ini belum memenuhi target RAD-TPB tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 4,01 persen.

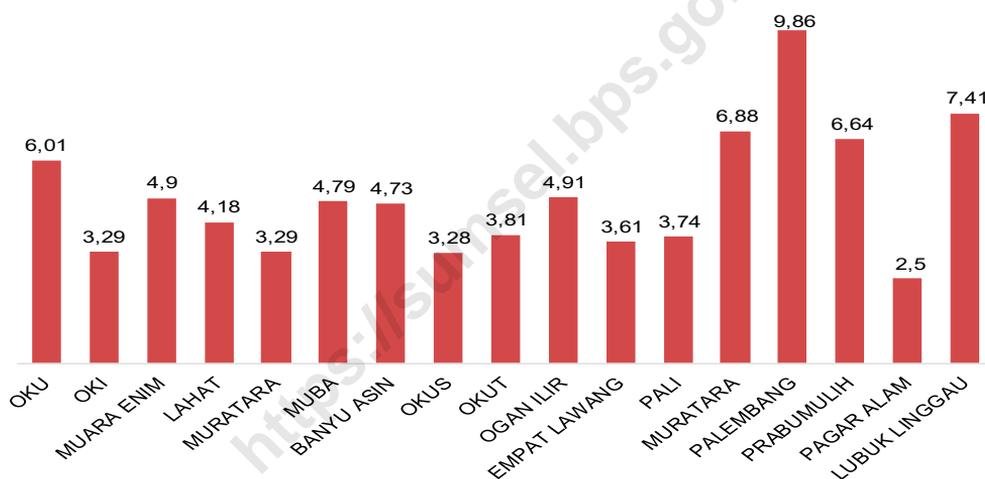
Secara absolut, angka pengangguran di Sumatera Selatan pada Tahun 2020 masih relatif tinggi yaitu sebesar 238,363 orang, di mana 52,17 persen diantaranya belum pernah bekerja. Hal ini menunjukkan masih banyaknya pencari kerja yang tidak tertampung oleh lapangan kerja yang ada, sehingga menyebabkan mereka terpaksa menganggur. Untuk itu, diperlukan penciptaan lapangan kerja yang cukup banyak agar dapat menampung tenaga kerja yang menganggur tersebut. Hal lain yang turut mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Selatan adalah perkembangan keadaan perekonomian secara global.

TPT di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan selain karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk, kemungkinan juga karena dipengaruhi oleh arus masuk



angkatan kerja dari daerah pedesaan atau dari daerah lainnya diluar Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten/kota yang masih didominasi daerah pedesaan mempunyai tingkat pengangguran terbuka yang rendah, seperti Kota Pagar Alam dan Kabupaten OKU Selatan yang cenderung berkarakteristik pedesaan masing-masing sebesar 2,50 persen dan 3,28 persen. Sedangkan Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau merupakan 2 (dua) kota yang mempunyai tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu 9,86 persen dan 7,41 persen.

Gambar 8.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR 8.5.2(A) TINGKAT SETENGAH PENGANGGURAN

Di Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2020 tingkat setengah pengangguran angkanya cukup tinggi yaitu 12,98 persen. Mereka yang dikategorikan sebagai setengah pengangguran dalam konsep ini adalah yaitu mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu dan masih mencari pekerjaan.

Dilihat menurut perbedaan daerah tempat tinggal tingkat setengah pengangguran di pedesaan jauh lebih tinggi daripada tingkat setengah pengangguran di perkotaan, padahal TPT di daerah pedesaan justru jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkotaan. Dari ilustrasi diatas dapat diketahui bahwa penduduk di pedesaan memang lebih banyak yang bekerja dibandingkan perkotaan, akan tetapi banyak yang bekerja pada sektor-sektor informal dan bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.



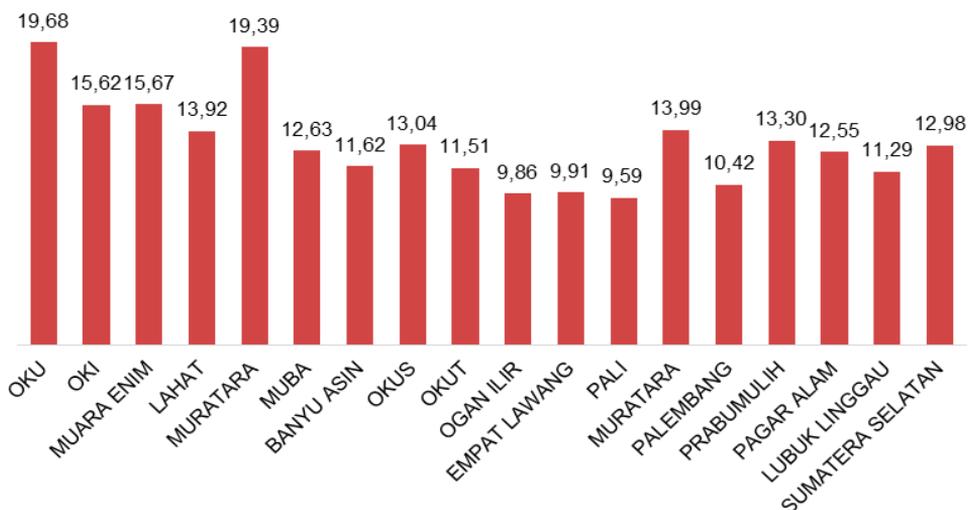
Gambar 8.11
Tingkat Setengah Pengangguran (persen), 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Bila dilihat menurut kabupaten/kota, hampir diseluruh kabupaten/kota di seluruh Sumatera Selatan mempunyai tingkat setengah pengangguran diatas 10 pesen, kecuali Kabupaten Ogan Ilir, Empat Lawang dan Pali. Bahkan bila diamati lebih lanjut, kabupaten -kabupaten dengan dominasi daerah pedesaan seperti Kabupaten OKI, Kabupaten OKU, dan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki tingkat setengah pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari sini dapat di duga bahwa penduduk yang bekerja pada kabupaten tersebut sebagian besar dari mereka termasuk dalam kelompok setengah pengangguran adalah para pekerja keluarga di sektor pertanian.

Gambar 8.12
Tingkat Setengah Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



INDIKATOR 8.6.1 PERSENTASE USIA MUDA (15-24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA, ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)

Gambar 8.13
Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (persen), 2019-2020

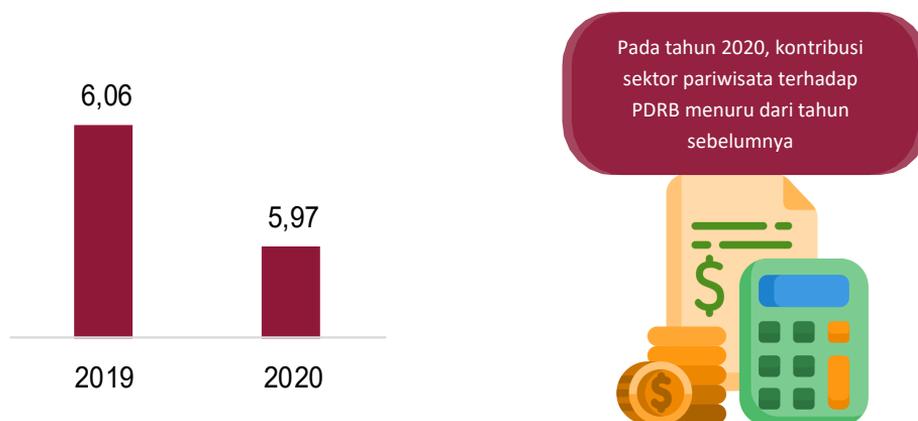


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan cenderung menurun. Ada sebesar 25,55 pemuda yang tidak mengalami bekerja, sekolah, atau pelatihan pada tahun 2020, jauh meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 22,59 persen. angka ini belum mencapai target SDGs tahun 2020 yang sebesar 17,93 persen.

INDIKATOR 8.6.2 PROPORSI KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB

Gambar 8.14
Proporsi Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen), 2019-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Selatan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 5,97 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 6,06 persen. Namun telah mencapai target RAD SDG's tahun 2020 yang sebesar 4 persen.

INDIKATOR 8..9.1. (A) PERSENTASE USIA MUDA (15-24 TAHUN) YANG SEDANG TIDAK SEKOLAH, BEKERJA, ATAU MENGIKUTI PELATIHAN (NEET)

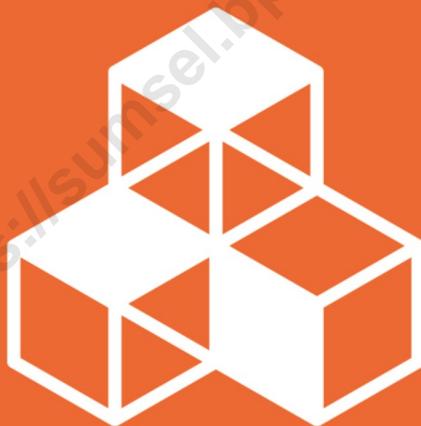
Gambar 8.15
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang), 2019-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) di Sumatera Selatan tercatat sebesar 15.846 orang, selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar menjadi hanya sebesar 2.297 orang. Jika dibandingkan dengan target RAD, jumlah tersebut masih dibawah target yang ditetapkan. Ditargetkan jumlah wisman di Sumatera Selatan pada tahun 2020 sebesar 78.186 orang.

9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI



MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI



Aspek penting pembangunan berkelanjutan pada tujuan 9 adalah infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

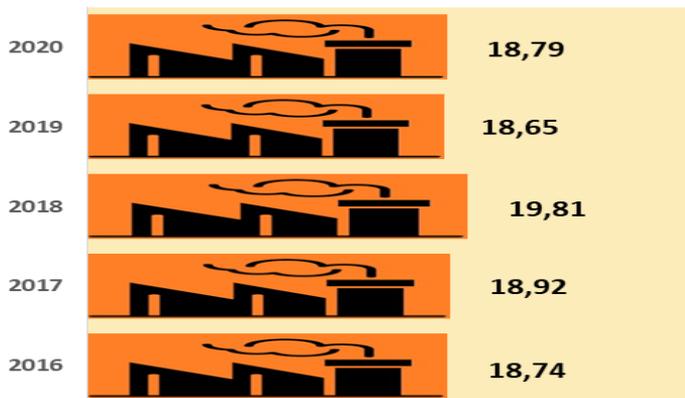
TARGET 9.2 **MEMPROMOSIKAN INDUSTRIALISASI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, DAN PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PROPORSI INDUSTRI DALAM LAPANGAN KERJA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO, SEJALAN DENGAN KONDISI NASIONAL, DAN MENINGKATKAN DUA KALI LIPAT PROPORSINYA DI NEGARA KURANG BERKEMBANG.**

INDIKATOR 9.2.1 **PROPORSI NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDRB DAN PERKAPITA**

Kontribusi sektor industri manufaktur menunjukkan tren menurun selama 2019-2020. Namun, nilai tambah industri manufaktur perkapita menunjukkan penurunan. Ini artinya produksi dari sektor industri manufaktur terus berkembang, namun outputnya belum mampu berkontribusi secara maksimal dalam mendukung perekonomian Sumatera Selatan. Inovasi perlu ditingkatkan untuk mendukung tercapainya industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 9.1

Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2016-2020

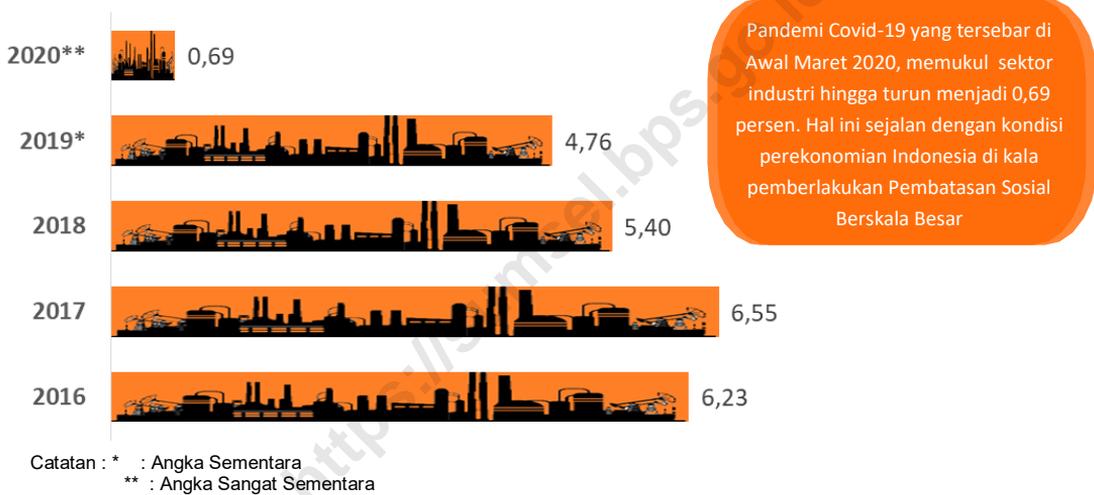


Sumber : Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 9.2.1.(A) LAJU PERTUMBUHAN NILAI TAMBAH INDUSTRI MANUFAKTUR CENDERUNG MENURUN, HAL INI SEJALAN DENGAN KONTRIBUSINYA YANG TERUS MENURUN DALAM PEREKONOMIAN SUMATERA SELATAN. PADA TAHUN 2016 PERTUMBUHANNYA SEBESAR 6,23 PERSEN LALU TUMBUH PADA TAHUN 2017 MENJADI 6,55 PERSEN. PERTUMBUHAN NILAI TAMBAH INDUSTRI MANUFAKTUR TERUS MENURUN HINGGA 0,69 PERSEN

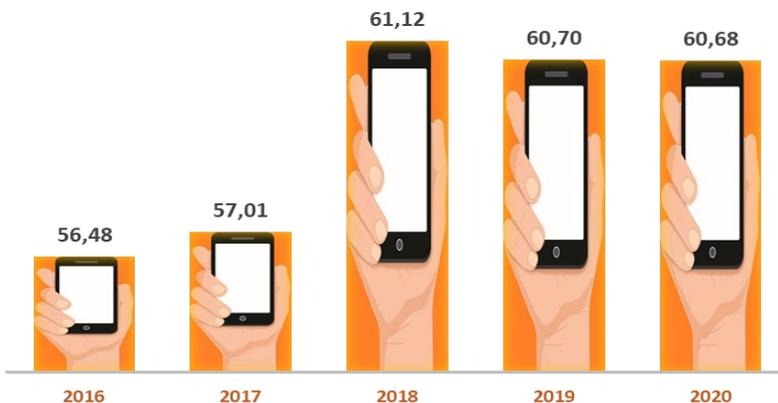
Gambar 9.2
Laju Pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur Sumatera Selatan (persen), 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 9.C.1.(A) PROPORSI INDIVIDU YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON GENGAM

Gambar 9.3
Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telpn Genggam (persen), 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik



Secara umum penduduk yang menguasai/memiliki telepon selular (HP)/nirkabel di setiap tahun selalu meningkat hingga tahun 2019. Namun, adanya kebijakan untuk membatasi mobilitas penduduk guna menekan laju penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut tentunya berdampak pada keinginan individu untuk memiliki gawai yang terbaru ditunda karena adanya kebijakan PSBB dimana hanya aktivitas penting saja yang diizinkan untuk keluar rumah.

INDIKATOR 9.C.1.(B) PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET

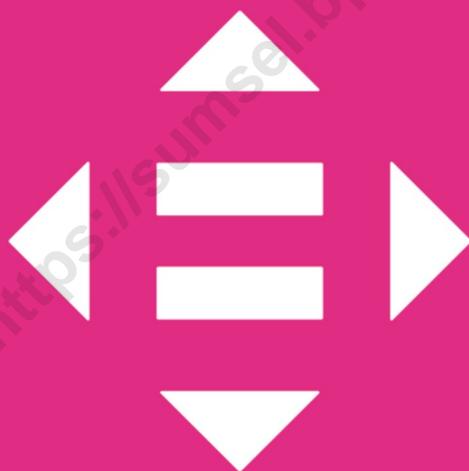
Gambar 9.4
Proporsi Individu yang Menggunakan Internet (persen), 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Internet menjadi alat yang penting bagi public untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Penggunaan internet di sini termasuk dalam mengakses media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *titktok*, *whatsapp*, dan lain-lain.

10 MENGURANGI KETIMPANGAN



<https://sumsel.bps.go.id>

MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA

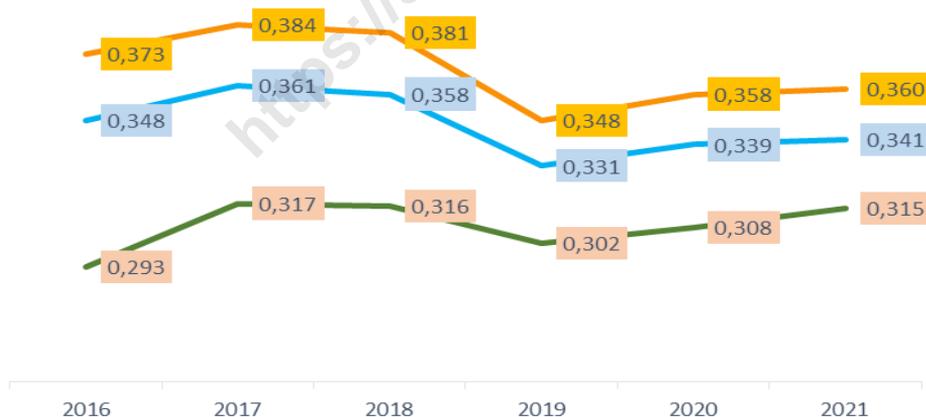


Kesenjangan dapat terjadi dalam suatu negara atau antarnegara, adanya kesenjangan dapat mengancam pembangunan dalam jangka panjang, baik dari sisi pembangunan sosial maupun ekonomi. Kesenjangan juga akan mengganggu penurunan kemiskinan dan apabila dibiarkan akan menimbulkan tindak kriminal dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian penurunan kesenjangan harus disegerakan baik di dalam negara sendiri maupun antarnegara.

TARGET 10.1 BERKURANGNYA KESENJANGAN

INDIKATOR 10.1.1* KOEFISIEN GINI

Gambar 10.1
Koefisien Gini, 2016-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

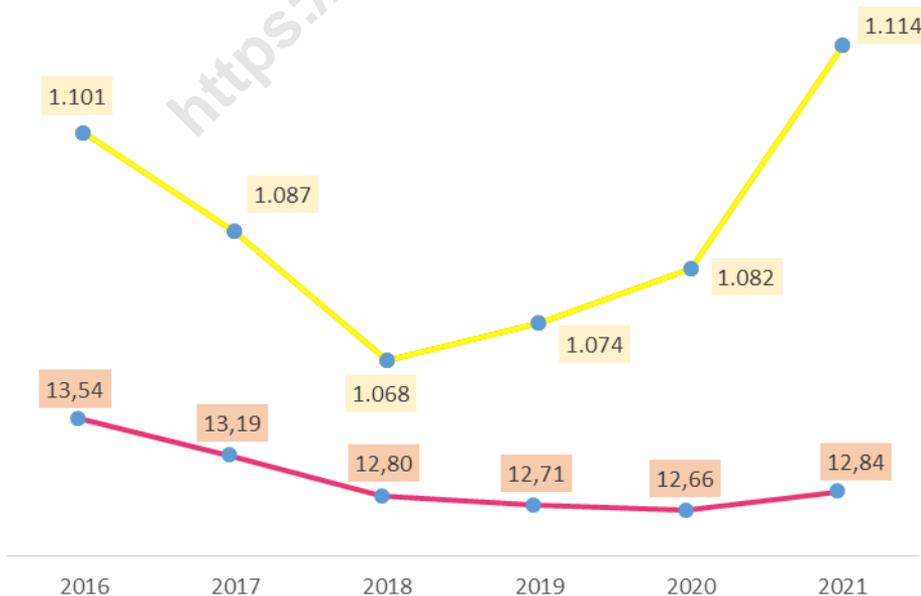
Nilai koefisien gini cenderung meningkat pada periode 2016-2020, menandakan adanya kecenderungan kenaikan ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini tahun 2020 sebesar 0,339 meningkat 0,008 poin dibandingkan koefisien gini tahun 2019 sebesar 0,331. Berdasarkan daerah tempat tinggal, daerah perdesaan lebih timpang dibandingkan daerah perkotaan.



INDIKATOR 10.1.1.(A) PERSENTASE PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN SUMATERA SELATAN

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disebut dengan penduduk miskin. Setelah beberapa tahun mengalami penurunan, pada tahun 2020 penduduk miskin di Sumatera Selatan meningkat XX poin menjadi xx persen. Penyebab dari peningkatan jumlah penduduk miskin salah satunya adalah karena Pandemi Covid-19, dimana diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona. Dengan PSBB menyebabkan aktivitas perekonomian terganggu dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan penduduk, terutama pada masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survey sosial demografi BPS, kelompok bawah atau masyarakat berpendapatan rendah, sekitar 70 persen mengaku mengalami penurunan pendapatan.

Gambar 10.2
Persentase (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang), 2016-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

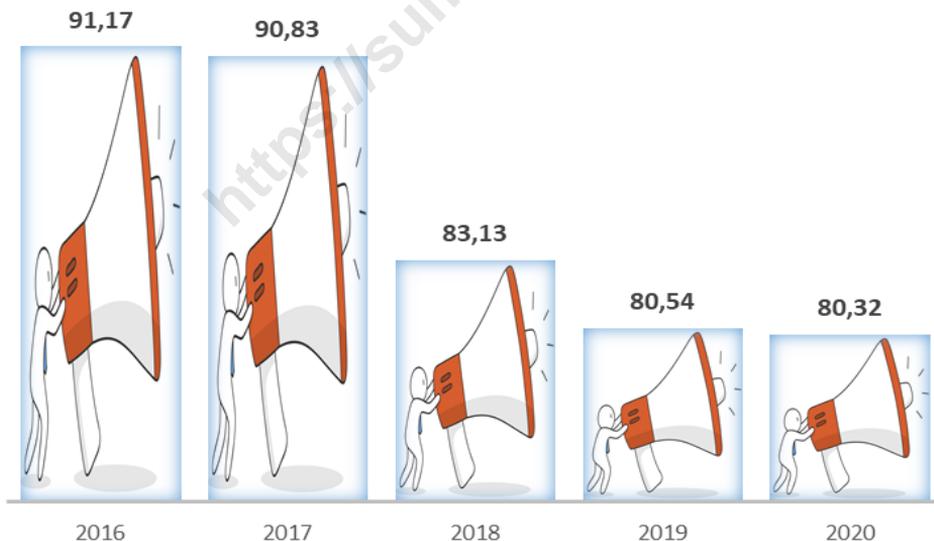


TARGET 10.3 MENJAMIN KESEMPATAN YANG SAMA DAN MENGURANGI KESENJANGAN HASIL, TERMASUK DENGAN MENGHAPUS HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK YANG DISKRIMINATIF, DAN MEMPROMOSIKAN LEGISLASI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT

INDIKATOR 10.3.1(A) INDEKS KEBEBASAN SIPIL

Tingkat kebebasan sipil dikategorikan “baik” apabila nilai indeks lebih dari 80, “sedang” apabila nilai indeks berkisar 60 – 80 dan “buruk” apabila nilai indeks kurang dari 60. Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan cenderung menurun dari tahun 2016 dengan kategori baik. Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan 2020 sebesar 80,32 belum mencapai target Rencana Aksi Daerah (RAD) 2020, yaitu sebesar 93,02

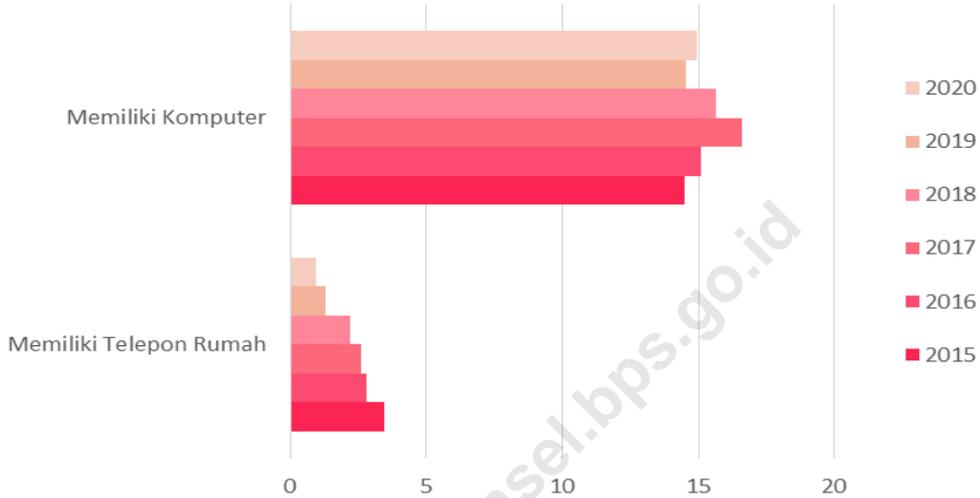
Gambar 10.3
Indeks Kebebasan Sipil Sumatera Selatan (persen), 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

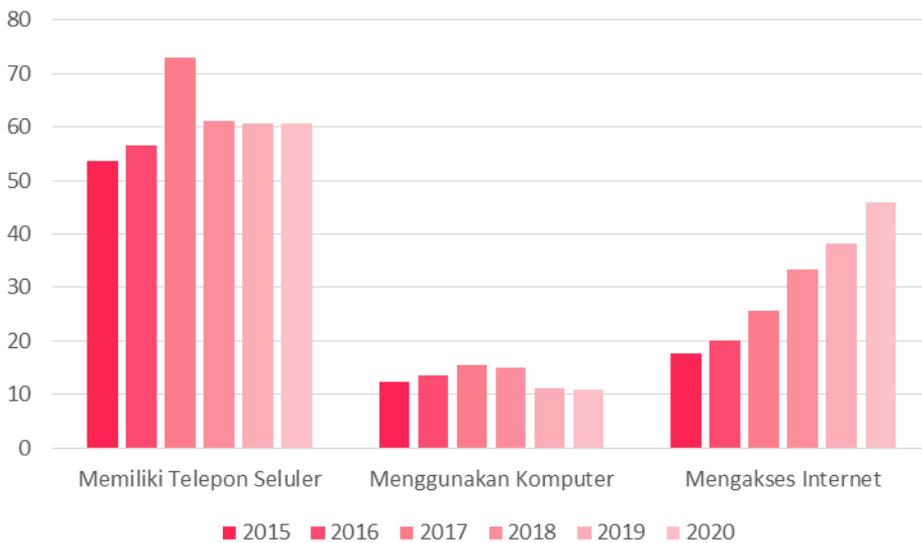


Gambar 10.4
Rumah Tangga Sumatera Selatan Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 10.5
Penduduk Sumatera Selatan 5 Tahun ke Atas Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik



Tabel 10.1
Rumah Tangga Sumatera Selatan Menurut Beberapa Indikator Akses
Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2015-2020

Kabupaten/Kota	Memiliki Telepon Rumah 2020	Memiliki Telepon Rumah 2019	Memiliki Komputer 2020	Memiliki Komputer 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ogan Komering Ulu	1,35	1,06	13,02	15,25
Ogan Komering Ilir	0,23	0,46	8,09	6,35
Muara Enim	0,36	1,01	16,48	15,49
Lahat	0	1,7	13,72	14,33
Musi Rawas	0	0,23	7,59	9,43
Musi Banyuasin	0,38	0	10,41	10,22
Banyuasin	0,15	0,49	11,96	11,45
OKU Selatan	0	0	5,51	5,82
OKU Timur	0,12	0,35	7,48	9,91
Ogan Ilir	0	0,3	12,34	14,25
Empat Lawang	0,27	0,84	9,45	6,73
PALI	0	0	8,84	11,06
Musi Rawas Utara	0,23	0,12	6,23	9,37
Palembang	3,56	4,56	31,72	27,39
Prabumulih	2,37	0,78	22,49	26,74
Pagar Alam	0,42	0,49	13,37	13,72
Lubuk Linggau	1,73	3,25	24,77	27,89
Sumatera Selatan	0,93	1,32	14,97	14,57

Sumber : Badan Pusat Statistik



Tabel 10.2
Penduduk 5 Tahun ke Atas Sumatera Selatan menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi (persen), 2019-2020

Kabupaten/Kota	Penduduk 5+					
	Memiliki Telepon Selular	Memiliki Telepon Selular	Menggunakan Komputer	Menggunakan Komputer	Mengakses Internet	Mengakses Internet
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	61,35	60,1	11,24	11,5	39,89	48,84
(02) Ogan Komering Ilir	56,62	56,44	5,00	3,98	30,46	38,17
(03) Muara Enim	60,23	61,79	9,15	11,75	36,63	44,84
(04) Lahat	61,56	62,94	12,48	10,79	37,61	43,81
(05) Musi Rawas	54,51	55,99	8,26	6,72	29,76	36,41
(06) Musi Banyuasin	58,35	56,89	7,90	6,84	31,78	39,65
(07) Banyuasin	53,33	56,93	7,75	7,33	33,08	43,32
(08) OKU Selatan	50,98	51,7	4,24	6,27	24,13	26,52
(09) OKU Timur	55,07	52,85	8,75	9,22	32,03	40,69
(10) Ogan Ilir	57,53	58,43	10,89	8,18	34,31	41,71
(11) Empat Lawang	48,69	49,4	5,22	7,17	20,24	28,91
(12) PALI	58,18	55,78	6,3	7,93	31,19	36,56
(13) Musi Rawas Utara	52,15	51,86	6,72	6,03	26,63	34,23
(71) Palembang	74,61	73	20,02	19,91	57,13	65,74
(72) Prabumulih	65,98	66,26	19,56	17,36	51,98	56,44
(73) Pagar Alam	62,37	67,79	10,39	12,83	38,75	47,69
(74) Lubuk Linggau	72,23	68,86	22,41	19,99	51,15	58,31
Sumatera Selatan	60,70	60,68	11,10	10,89	38,14	46,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

11 KOTA DAN KOMUNITAS YANG BERKELANJUTAN



MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN



PDRB pada tahun 2030 lebih dari enam puluh persen penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan daerah perkotaan dalam aspek perekonomian yang lebih efisien pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, transportasi dan jasa. Dengan perencanaan dan manajemen resiko yang baik, kota dapat dijadikan inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan penggerak dari pembangunan berkelanjutan.

Indikator rumah layak huni dapat berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan. Pada indikator ini, data yang tersedia merupakan data proporsi.

TARGET 11.1 **PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA TERHADAP PERUMAHAN YANG LAYAK, AMAN TERJANGKAU, TERMASUK PENATAAN KAWASAN KUMUH, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR PERKOTAAN**

INDIKATOR 11.1.1(A) **JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DAN TERJANGKAU**

Gambar 11.1
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau (persen), 2016-2020



Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni mengalami peningkatan di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan



Akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan hak dan kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Pada tahun 2016-2018, Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau terus meningkat. Tercatat di tahun 2018, 94,54 persen rumah tangga telah memiliki akses hunian layak dan terjangkau. Pada tahun 2019, terjadi perubahan konsep dan definisi perhitungan pada komponen pembangunannya, yaitu air minum layak dan sanitasi layak. Dengan konsep dan definisi baru tersebut, sebanyak 52,24 persen di tahun 2019 dan 55,25 persen di tahun 2020 rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau.

<https://sumsel.bps.go.id>

16 PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat



MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN



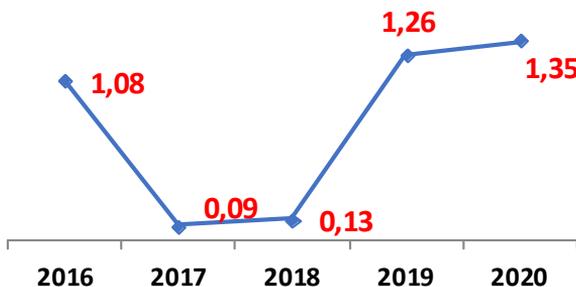
Perwujudan masyarakat yang adil, damai dan inklusif membutuhkan peran yang komprehensif, realistis, efisien dan transparan. Pembangunan berkelanjutan harus mampu mengatasi berbagai ancaman kejahatan seperti ancaman pembunuhan, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, dan perdagangan manusia. Selain mengakhiri kekerasan, promosi supremasi hukum dan penguatan institusi di setiap tingkatan dapat menjadi langkah dalam mencapai tujuan ini. Perlindungan terhadap korban kekerasan, tindak kejahatan dan eksploitasi juga perlu terus ditingkatkan untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan pemenuhan hak asasi manusia. Teratasinya tantangan tersebut tentu dapat mendukung terwujudnya masarakat yang inklusif dan damai. , kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

TARGET 16.1 SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN TERKAIT ANGKA KEMATIAN DIMANAPUN

INDIKATOR 16.1.3.(A) PROPORSI PENDUDUK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Gambar 16.1

Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir, 2016-2020



Pada tahun 2020, proporsi penduduk yang menjadi korba kejahatan di Sumatera Selatan kembali meningkat dibanding tahun 2019

Sumber : SUSENAS (diolah), Badan Pusat Statistik



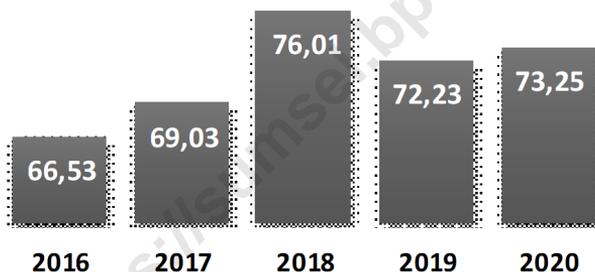
Kejahatan kekerasan dalam konteks ini mencakup penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual. Dalam dua tahun terakhir, penduduk yang mengalami kekerasan di Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Peningkatan proporsi kejahatan kekerasan ini menandakan masih perlunya upaya pencegahan dan pengamanan lingkungan di Sumatera Selatan, terutama di wilayah rawan kekerasan.

TARGET 16.7 MENJAMIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG RESPONSIF, INKLUSIF, PARTISIPATIF DAN REPRESENTATIF DI SETIAP TINGKATAN

INDIKATOR 16.7.2.(A) INDEKS LEMBAGA DEMOKRASI

Gambar 16.2

Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan dalam 12 Bulan Terakhir, 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kemenko Polhukam (IDI)

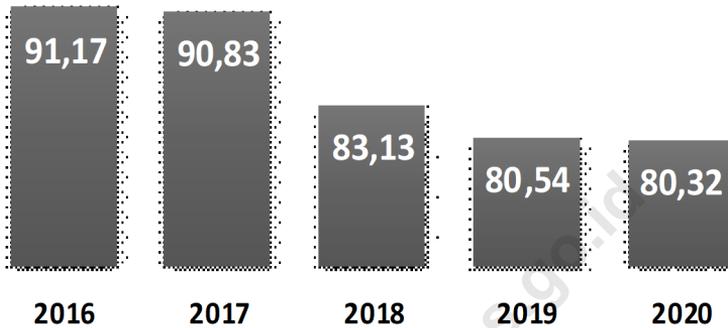
Indeks Lembaga Demokrasi mengukur kinerja lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen. Walaupun indeks lembaga demokrasi sempat menurun pada tahun 2016, indikator ini terus membaik pada tahun 2018, menurun di tahun 2019 dan kembali meningkat di tahun 2020. Pada tahun 2016, indeks lembaga demokrasi tercatat sebesar 66,53 persen kemudian meningkat hingga 73,25 persen pada tahun 2019.

INDIKATOR 8.6.2 PROPORSI KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB

Kebebasan individu sebagai warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diukur dengan Indeks Kebebasan Sipil. Selama tahun 2016-2020, indeks kebebasan sipil di Sumatera Selatan terus mengalami penurunan, dari 91,17 prsen di tahun 2016 menjadi 80,32 persen di tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan kebebasan individu dan kelompok dalam berkumpul, berserikat, berpendapat, berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian berbagai pihak yang berkaitan.



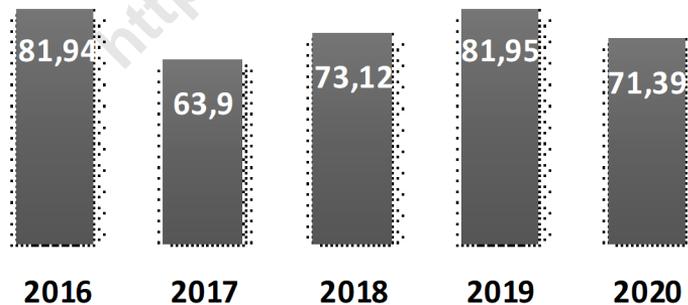
Gambar 16.3
Indeks Kebebasan Sipil, 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kemenko Polhukam (IDI)

INDIKATOR 16.7.2.(C) INDEKS HAK-HAK POLITIK

Gambar 16.4
Indeks Hak-Hak Politik, 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kemenko Polhukam (IDI)

Capaian Indeks Hak-Hak Politik Sumatera Selatan sepanjang tahun 2016-2019 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada periode 2017-2019 indeks ini memiliki trend yang meningkat sebelum kembali menurun di tahun 2020 menjadi 71,39 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak-hak politik warga negara dalam hal memilih/dipilih maupun berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di pemerintahan dan lembaga legislatif pada tahun 2020 mengalami beberapa gangguan.



TARGET 16.9 **PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN IDENTITAS YANG SYAH BAGI SEMUA, TERMASUK PENCATATAN KELAHIRAN**

INDIKATOR 16.9.1* Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil

Akta kelahiran adalah dokumen resmi negara yang merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Persentase anak umur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran menurun dari 78,97 persen di tahun 2016 menjadi 76,15 persen pada tahun 2019 sebelum kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi 79,36 persen. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran dikhawatirkan berdampak pada rendahnya jaminan pengakuan anak di hadapan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan pelayanan kesehatan dan kemiskinan.

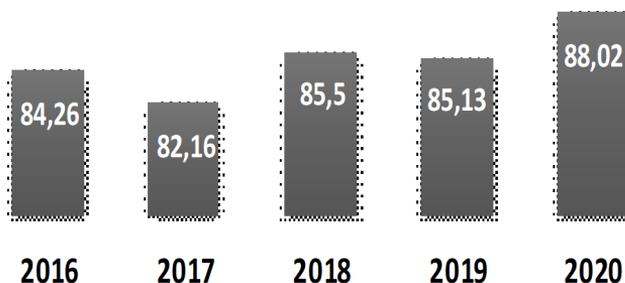
Gambar 16.5
Persentase Anak Berumur 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin, 2018-2020



Sumber : SUSENAS (diolah), Badan Pusat Statistik

INDIKATOR 16.9.1.(A) **PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA LAHIR UNTUK PENDUDUK 40% BERPENDAPATAN RENDAH**

Gambar 16.6
Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah dan yang Memiliki Akta Kelahiran, 2016-2020



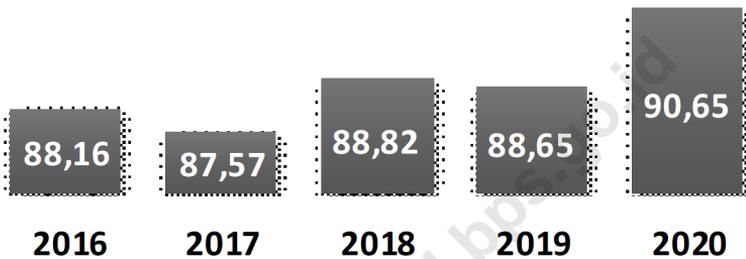
Sumber : SUSENAS (diolah), Badan Pusat Statistik



INDIKATOR 16.9.1.(B) PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN

Gambar 16.7

Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun dengan Pendapatan 40% Bawah dan yang Memiliki Akta Kelahiran, 2016-2020



Sumber : SUSENAS, Badan Pusat Statistik

Akta kelahiran adalah dokumen resmi negara yang merupakan surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Persentase anak umur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran menurun dari 78,97 persen di tahun 2016 menjadi 76,15 persen pada tahun 2019 sebelum kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 menjadi 79,36 persen. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran dikhawatirkan berdampak pada rendahnya jaminan pengakuan anak di hadapan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan pelayanan

17 KEMITRAAN
UNTUK MENCAPAI
TUJUAN



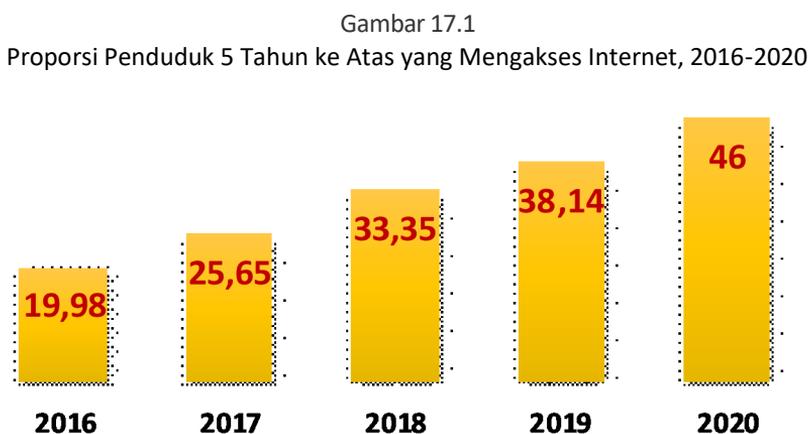
MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Agenda pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan terjalannya kemitraan dan kerja sama global yang kuat. Kemitraan yang inklusif dijalin antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta dibangun atas prinsip, visi, dan tujuan bersama. Kerja sama di tingkat internasional juga harus ditingkatkan guna memastikan dan memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang. Kebijakan-kebijakan internasional harus dapat mendukung negara berkembang dalam mempromosikan perdagangan internasional, investasi, dan meningkatkan ekspor. Dengan demikian, sistem perdagangan yang berdasarkan peraturan yang adil universal, terbuka dan menguntungkan bagi semua dapat tercapai.

TARGET 17.1 MENGOPERASIONALISASIKAN SECARA PENUH BANK TEKNOLOGI DAN SAINS, MEKANISME PEMBANGUNAN KAPASITAS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2017 DAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INDIKATOR 17.8.1* PROPORSI INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN INTERNET



Sumber : SUSENAS, Badan Pusat Statistik

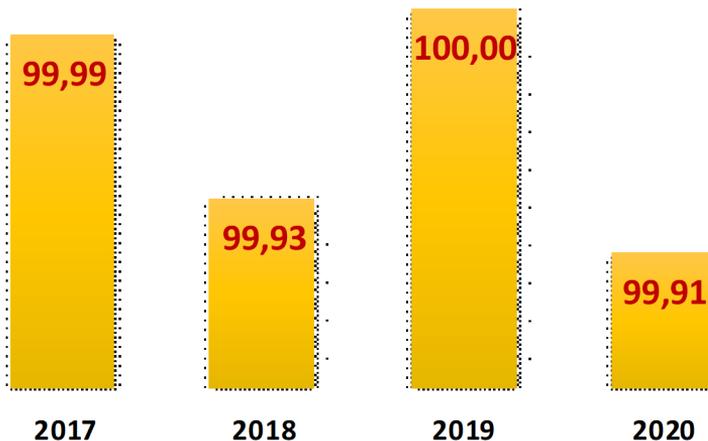


Selama tahun 2016-2020, persentase penduduk Sumatera Selatan yang menggunakan internet terus mengalami peningkatan hingga mencapai 46,00 persen di tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan peran internet sebagai media informasi dan komunikasi seiring dengan adanya pembangunan teknologi informasi dan perkembangan masyarakat digital.

TARGET 17.18 **PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, UNTUK MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN KETERSEDIAAN DATA BERKUALITAS TINGGI, TEPAT WAKTU DAN DAPAT DIPERCAYA, YANG TERPILAH BERDASARKAN PENDAPATAN, GENDER, UMUR, RAS, ETNIK, STATUS MIGRASI, DIFABILITAS, LOKASI GEOGRAFIS DAN KARAKTERISTIK LAINNYA YANG RELEVAN DENGAN KONTEKS SOSIAL**

INDIKATOR 17.18.1.(A) **PERSENTASE KONSUMEN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) YANG MERASA PUAS DENGAN KUALITAS DATA STATISTIK**

Gambar 17.2
Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik, 2017-2020



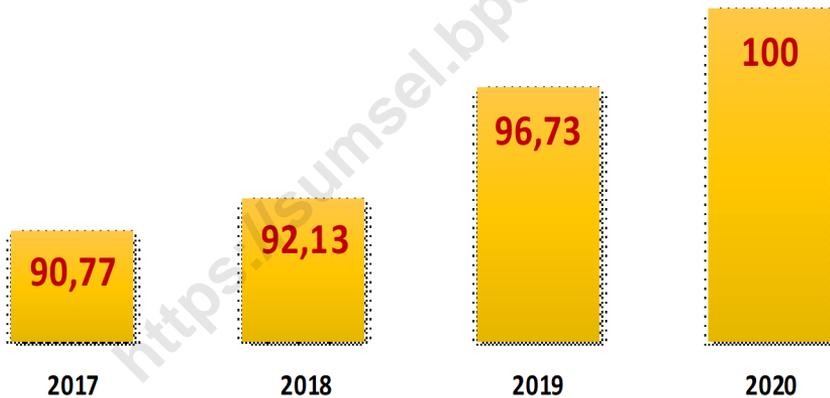
Sumber : Survei Kebutuhan Data, Badan Pusat Statistik



Peningkatan ketersediaan data berkualitas tinggi dapat dilihat dari respon pengguna data statistik. Sebagai lembaga statistik nasional, BPS harus dapat menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Selama tahun 2017-2020, persentase konsumen data BPS di Sumatera Selatan yang merasa puas dengan kualitas data statistik sudah sangat baik mencapai hingga 99,1 persen di tahun 2020.

INDIKATOR 17.18.1.(B) PERSENTASE KONSUMEN YANG MENJADIKAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK BPS SEBAGAI RUJUKAN UTAMA

Gambar 17.3
Persentase Konsumen yang Menggunakan Data dan Informasi Statistik BPS sebagai Rujukan, 2017-2020



Sumber : Survei Kebutuhan Data, Badan Pusat Statistik

Persentase konsumen di Sumatera Selatan yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama pada tahun 2017 adalah sebesar 90,77 persen. Selanjutnya persentase tersebut terus meningkat hingga mencapai 100 persen di tahun 2020. Hal tersebut meunjukkan bahwa konsumen data di Sumatera Selatan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap penggunaan data statistik BPS.



TARGET 17.19 PADA TAHUN 2030, MENGANDALKAN INISIATIF YANG SUDAH ADA, UNTUK MENGEMBANGKAN PENGUKURAN ATAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG MELENGKAPI PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAPASITAS STATISTIK DI NEGARA BERKEMBANG

INDIKATOR 17.19.2.(D) PERSENTASE KONSUMEN YANG PUAS TERHADAP AKSES DATA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

Gambar 17.4

Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik, 2017-2020



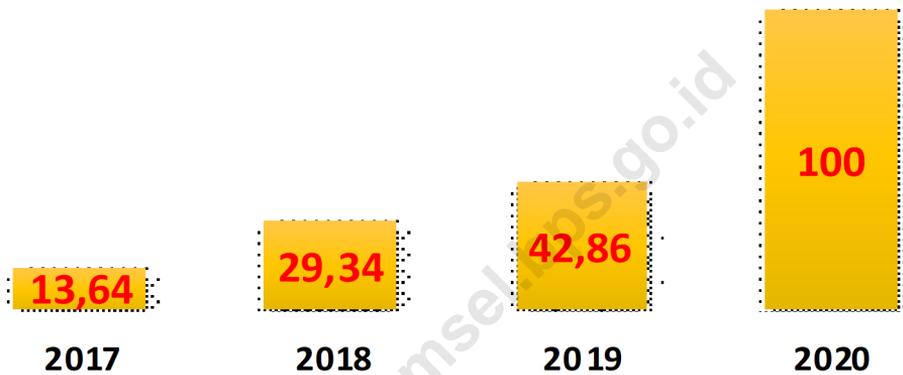
Sumber : Survei Kebutuhan Data, Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2017-2020, persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Di tahun 2017, sebanyak 93,4 persen konsumen mengaku puas terhadap akses data BPS dan angkanya terus meningkat sebanyak 100 persen di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPS telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mempermudah akses data dan informasi statistik.



INDIKATOR 17.19.2.(E) PERSENTASE KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN DATA BPS DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL

Gambar 17.5
Persentase Konsumen yang Menggunakan Data BPS dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional, 2017-2020



Sumber : Survei Kebutuhan Data, Badan Pusat Statistik

Konsumen data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadikan data tersebut sebagai perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional telah mencapai 100 persen. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya sebesar 13,64 persen di tahun 2017, 29,34 persen di tahun 2018, dan 42,86 persen di tahun 2019. Peningkatan angka tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kemampuan BPS sebagai lembaga statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan nasional.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jalan Kapten Anwar Sastro No.1131 Palembang
Telepon: (0711) 353174, Fax: (0711) 353174
Email: bps1600@bps.go.id

ISBN 978-602-6925-62-6



9 786026 925626